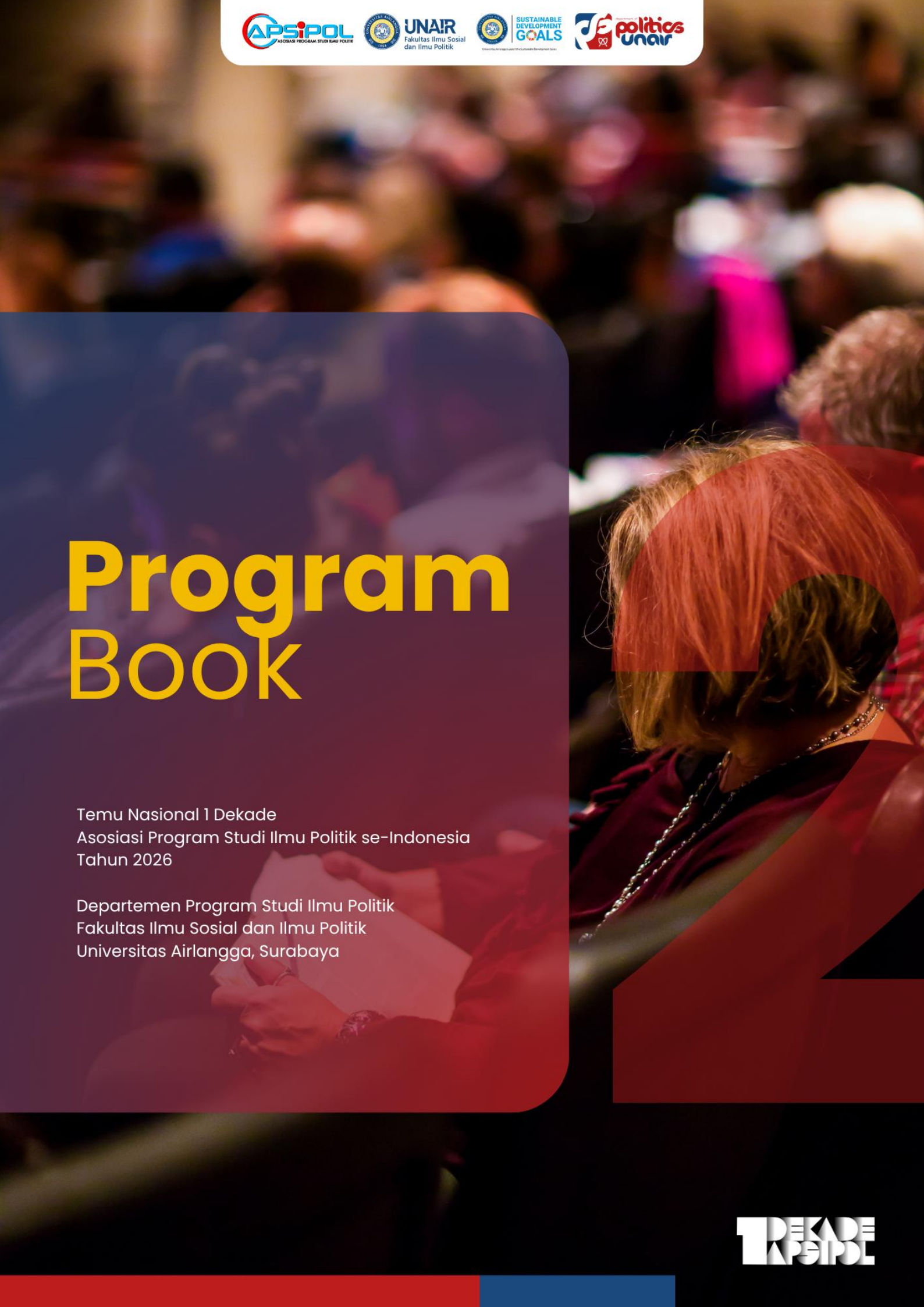


Program Book

Temu Nasional 1 Dekade
Asosiasi Program Studi Ilmu Politik se-Indonesia
Tahun 2026

Departemen Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga, Surabaya

Sambutan Ketua APSIPOL

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan seru sekalian alam, atas kuasa dan kehendak-Nya Guide and Program Book National Conference, Temu Nasional dan Milad Satu Dekade Asosiasi Program Studi Ilmu Politik se-Indonesia (APSIPOL) bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya telah hadir di tengah-tengah kita semua. Hadir dengan berbagai abstrak sebagai representasi pemikiran, pengkajian, dan penelitian utuh para akademisi ilmu politik dan ilmu sosial peserta National Conference. Aktivitas ilmiah yang pada kesempatan kali ini berpusat pada topik Kedaulatan Digital, Keamanan Siber dan Masa depan Demokrasi Indonesia.

Kita menjadi bagian tak terputus dari ikhtiar kaum cendekiawan sepanjang masa yang terus-menerus merawat dan sekaligus mengangkat martabat manusia melalui ilmu, praktik, dan sistem politik. Di Indonesia Kita telah memilih demokrasi menjadi ilmu, praktik, dan sistem politik yang relevan dengan segala ikhtiar tersebut. Oleh karena itu segala tantangan yang sedang dan akan terus dihadapi masa depan demokrasi, termasuk tantangan kedaulatan digital dan keamanan siber, menjadi tugas Ilmu Politik untuk mengkaji dan sekaligus menawarkan Solusi ilmiah. Tantangan yang karena sesungguhnya senantiasa berhubungan dengan kekuasaan, institusi, ideologi, kebijakan, partisipasi, dan kewargaan.

Kehadiran sejumlah abstrak para akademisi ilmu politik dan ilmu sosial ini dengan berbagai paradigma, fokus dan konteks telah serta merta memperkaya wawasan sekaligus khazanah hasil studi yang dapat berkontribusi nyata atau berdampak, tidak hanya berkontribusi bagi pengembangan ilmu politk itu sendiri namun juga bagi pengembangan dan penerapan kebijakan penghidupan demokrasi di era digital seperti dewasa ini.

Akhirnya, Saya atas nama Ketua Umum APSIPOL mengucapkan terima kasih kepada segala pihak dan selamat melaksanakan National Conference dan Temu Nasional. Kegiatan yang sangat istimewa sebab bertepatan dengan satu dekade pendirian APSIPOL, 2 November 2016 – 2 November 2026. Satu dekade Apsipol, satu ppisode dari kepeloporan menuju keberdampakan.

Surabaya, November 2026

Dr. Asep A. Sahid Gatara, S.Ag., M.Si., CPS.
Ketua Umum Asosiasi Program Studi Ilmu Politik se-Indonesia



Sambutan

Kepala Departemen Politik UNAIR sekaligus Ketua Panitia Peringatan 10 Tahun APSIPOL

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Program Book Peringatan 10 Tahun Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia (APSIPOL) dapat disusun sebagai bagian dari rangkaian kegiatan yang mengangkat tema "Kedaulatan Digital, Keamanan Siber dan Masa Depan Demokrasi Indonesia."

Peringatan satu dekade APSIPOL merupakan momentum penting untuk merefleksikan perkembangan pendidikan ilmu politik di Indonesia, memperkuat jejaring akademik antarlembaga, serta mendorong kontribusi pemikiran ilmiah dalam merespons berbagai tantangan politik kontemporer. Di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, persoalan kedaulatan digital dan keamanan siber telah menjadi bagian penting dalam pembahasan mengenai tata kelola pemerintahan, partisipasi politik, kebebasan berekspresi, serta keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Program Book ini menghimpun artikel-artikel yang telah disubmit oleh para penulis sebagai bentuk kontribusi akademik dalam memperkaya diskursus mengenai tema tersebut. Beragam gagasan, perspektif, dan hasil kajian yang disajikan diharapkan dapat menjadi ruang pertukaran pengetahuan sekaligus mendorong pengembangan penelitian ilmu politik yang relevan dengan dinamika masyarakat digital dan tantangan demokrasi masa kini.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh penulis, akademisi, peneliti, pengelola program studi ilmu politik, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan publikasi ini. Partisipasi dan kerja sama yang terjalin menjadi bagian penting dalam memperkuat peran APSIPOL sebagai wadah kolaborasi akademik di bidang ilmu politik.

Semoga Program Book ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu politik, memperluas pertukaran gagasan, serta menjadi pijakan bagi kerja sama akademik yang berkelanjutan demi masa depan demokrasi Indonesia.

Surabaya, November 2026

Prof. Dr. Muhammad Asfar, Drs., M.Si.
Kepala Departemen Politik UNAIR sekaligus
Ketua Panitia Peringatan 10 Tahun APSIPOL



Daftar Isi

Sambutan Ketua Umum Asosiasi Program Studi Ilmu Politik se-Indonesia 2
Sambutan Kepala Departemen Politik UNAIR sekaligus Ketua Panitia Peringatan 10 Tahun APSIPOL 3
Daftar Isi 4
Jadwal Panel 10

PANEL 1 : Demokrasi, Pemilu, dan Representasi **17**

1 Democracy and Islamophobic Practices in the 2024 North Sumatra Gubernatorial Election: Identity Politics and Electoral Contestation in Indonesia 17
Warjio, Salamudin Nasution, Edy Iriawan

2 Antara Surau dan Kotak Suara: Otoritas Keagamaan Sufi dan Relasi Klientelistik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 18
Sadri, Valina Singka Subekti, Meidi Kosandi

3 Tantangan Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2024 19
Ahmad Rifki Nurfebriansyah

4 Evaluasi dan Strategi Penguatan Penyelenggara Pemilu Serentak 2024 di Jawa Tengah 20
Martien Herna Susanti, Moh. Aris Munandar

5 Kontruksi Politik Identitas dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Politik pada Pilkada Kota Padang 2024 21
Lusi Puspika Sari, Ilham Havifi, Sadri

6 Sistem Pemilu dan Korupsi di Indonesia 22
Mangihut Siregar, Ratna Ani Lestari, Triana Dianita Handayani

PANEL 2 : Partai Politik dan Komunikasi Politik **23**

7 Potret Reformasi Pelembagaan Partai Politik: Distribusi Kekuasaan dan Demokrasi Internal pada PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan PKS 23
Idris Thaha, A. Bakir Ihsan, Savran Billahi

8 Mengurai Anomali Elektoral di Tanah Minang: Telaah Kronologis Karakteristik Kandidat, Dinamika Kampanye, dan Kriteria Pemimpin Ideal pada Pilpres di Sumatera Barat 24
Fakta Lovandez Abel, Hasan Mustapa

9 The Religious Narrative in the Israel-Palestine Conflict 25
Mhd Alfahjri Sukri, Muhammad Hizbi Islami, Ulya Fitri

10 Korupsi Pemerasan Abdul Wahid Gubernur Provinsi Riau Periode 2025-2030 26
Doni Hendrik

11 Ketika Keluarga Berencana Tidak Hanya Menjadi Urusan Perempuan: Analisis Strategi Adaptif Pemerintah dalam Mendorong Peserta Vasektomi di Kabupaten Bandung 27
Rendy Adiwilaga, Revannisa Alya Fitriani

12 Personalisasi Politik dan Dominasi Elektoral: Efek Patronase Figur Lokal Dalam Lonjakan Suara Partai Nasdem di Kabupaten Pinrang 28
Endang Sari, Sakinah Nadir, Muhammad Muhammad

PANEL 3 : Politik Digital dan E-Government 29

13 Politik Algoritma TIKTOK dan Facebook: Analisis Komparatif Instrumen Soft Power dalam Rivalitas China–amerika Serikat 29
Andini Ayu Febrian

14 Digital Transformation and Government Innovation in Public Complaint Services: E-government Effectiveness and Citizen Participation in South Tangerang City 30
Gefarina Djohan, Muhammad Danu Satrio

15 Digital Labor Alienation Facing Platform Algorithmic Exploitation (an Analysis of Online Ride Hailing Driver Resistance in Surabaya) 31
Laili Bariroh, Sting Bina Tara

16 Digitalisasi Surau: Regulasi Keagamaan pada Program Smart Surau di Kota Padang, Indonesia 32
Zulfadi, Archi Pratama, Mhd. Fajri

17 Governing AI in Urban Waste Management: Adaptive Accountability and Institutional Learning in Semarang, Indonesia (2024-2026) 33
Ajeng Widya Prakasita

18 Digital Colonialism and Muslim Political Agency: Rethinking Digital Sovereignty from the Global South 34
Asep Muhamad Iqbal

PANEL 4 : Gerakan Sosial dan Partisipasi Warga 35

19 Pengawasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (peti): Jaringan Kekuasaan dan Tantangan Akuntabilitas Negara di Sumatera Barat 35
Dewi Anggraini, Syaifuddin Islami

20 Satu Undang-Undang, Dua Rancangan: Otonomi Adat dan Relasi Kuasa pada Nagari dan Desa Adat Bali 36
Irawati, Dewi Anggraini, Tri Oktaviana

21 Citizenship and Uncertainty Regarding Spatial Rights: the Politics of Citizen Recognition in the Dupak Magersari Railway-adjacent Settlement, Surabaya 37
Galang Geraldy, Mandra Nur Alia, Rizca Yunike Putri

22 Energy without Institutions: Structural Constraints on Opposition in Post-reformasi Indonesia 38
Andhik Beni Saputra, Andri Rusta

23 Digital Citizenship and the Mechanisms of Contemporary Political Engagement: an Examination of the Bonatua Silalahi–Denny Indrayana Initiative for Public Institutional Responsibility 39
Hasan Mustapa, Mohamad Jaenudin, Muhammad Anwar Syi'arudin

24 Keadilan Ekologis dalam Perspektif Politik Lingkungan: Studi Kasus over Capacity di Tpa Tamangapa Makassar 40
Andi Gean Arifta Fawelau, Muhammad Abdullah Badri, Ilham Nufansya Haerul, Andi Alif, Raihan Analta, Muh Reski Wahyu Hidayat Amir, Sakinah Nadir

PANEL 5 : Keamanan Siber, Privasi, dan Kedaulatan Digital 41

25 Political Rhetoric on Digital Sovereignty and Cybersecurity: Discursive Contestation over the Future of Indonesian Democracy 41
Iding Rosyidin

26 Keamanan sebagai Konstruksi Kekuasaan: Reformasi POLRI dan Kebebasan Sipil dalam Demokrasi Indonesia 42
Muhammad Rafi Fadilah

27 Bukan Sekadar Spill the Tea: Membongkar Krisis Perlindungan dan Akuntabilitas Hukum di TikTok 43
Revani Angelina Mirabel, Zhahra Renitania, Regzi Cholimatus Sherin

28 Kebijakan Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Siber 44
Sidratahta Mukhtar

29 Potensi Penggunaan Pegasus Spyware sebagai Instrumen Pengawasan Digital untuk Kepentingan Politik: Studi atas Laporan Amnesty International 45
Husnul Isa Harahap

PANEL 6 : Literasi Politik dan Perlindungan di Era Digital 46

30 Pendidikan Politik di Era Digital: Membangun Partisipasi Anak Muda Melalui Literasi Informasi yang Kritis di Kota Palangka Raya 46
Alfrid Sentosa, Kur Junaidi, Betty Karya

31 Kolaborasi Perlindungan Anak dalam Perspektif Politik Kesejahteraan: Studi Kasus Program KoGuRuPa di Surabaya 47
Rizca Yunike Putri, Sri Musrifah

32 Dilema Algoritma dan Aktivisme Digital: Studi Netnografi pada Literasi Politik dan Perlindungan Anak di Instagram 48
Gian Sapta Ginanjar

33 Kolaborasi Perlindungan Anak dalam Perspektif Politik Kesejahteraan: Studi Kasus Program KoGuRuPa di Surabaya 49
Rizca Yunike Putri, Sri Musrifah

34 Kedaulatan Sinyal di Perbatasan: Studi Pendidikan Politik di Era Digital pada Masyarakat Perbatasan Indonesia-Timor Leste 50
Yeftha Yerianto Sabaat, Frans B.R. Humau

PANEL 7 : Transformasi Pemerintahan dan Kebijakan Publik 52

35 Melampaui Kesepakatan Antarlembaga: Tata Kelola Informal dan Kesenjangan Implementasi dalam Kebijakan Transportasi Perkotaan yang Terfragmentasi 52
Qurnia Indah Permata Sari, Abdul Aziz, Ahmad Sukron

36 Politik Pembuatan Klaim: Negosiasi Kelas Menengah dan Praktik Kewargaan dalam Tata Kelola Kota di Indonesia 54
Haryanto

37 Kepemimpinan Kolaboratif dan Political Entrepreneurship dalam Tata Kelola Koperasi Desa: Studi Kasus KMP Karangagung sebagai Model Pelayanan Publik Berbasis Komunitas 55
Ratna Ani Lestari, Mangihut Siregar, S. Agus Santosa

38 Trend and Gaps dalam Kebijakan Penanggulangan Banjir di Kota Palembang: Analisis Sistematic Literature Review 56
Siti Anisyah

39 Who Governs the Road? Ambulance Escorts and State Capacity in Indonesia, Japan, South Korea, Thailand, and India 57
Ali Muhyidin, Julian A. Pasha, Ardila Putri, Silvia Dian Anggraeni, Muhammad Imam

PANEL 8 : Gender, Inklusi, dan Keadilan Sosial 58

40 Gendered Digital Justice: Ai-enabled Political Abuse and the Limits of Women's Political Inclusion in Indonesia 58
Mashita Dewi Tidore

41 Budaya Patriarki, Relasi Kuasa, dan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Kabupaten Nias 59
Lis Hayanti Warasi, Ainissifa, Yolanda Tambunan

42 Class and Articulation: Contestation and Agency of Women Workers in Balinese Patriarchal Structures 60
Bandiyah, Kadek Dwita Apriani, Mashita Dewi Tidore

43 Dynasty Power of Sayye': Analisis Teori Struktural Fungsional di Tengah Hegemoni Endogamous Marriage sebagai Modernisasi Sosial pada Masyarakat Cikoang 61
Fadhil Perdana, Aluna Putri Sagita

44 Strategic Invisibility: Women's Political Campaigns in Conservative Religious Contexts 62
Teuku Muzaffarsyah, M. Akmal, Naidi Faisal

PANEL 9 : Politik Lokal, Identitas, dan Masyarakat 63

45 Relasi Sosial dan Politik Identitas dalam Kebijakan Desentralisasi di Palangka Raya 63
Handi Winata, Selvi Rantika Tera Natasya

46 Pengaruh Religiusitas dan Elite Politik dalam Pembangunan Tempat Hiburan di Banda Aceh 64
Muhammad Vikram, Annisah Putri, Rizfa Maghfirah, Reza Mahendra

47 Manajemen Konflik Dualisme Pusat Pemerintahan di Kabupaten Buton Utara 65
Inan Fauziyah, Ibrayoga Rizki Perdana

48 New Autonomous Region Or Stronger Service Delivery? a Comparative Policy Framework from Bogor Selatan, Indonesia 66

Mudiyati Rahmatunnisa, Nanang Suryana

49 Resistensi Politik Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Barat terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) 67
Herri Junius Nge, Ahirul Habib Padila, Kartoyo Antonius

50 Democratic Backsliding at the Local Level: the Appointment of Acting Village Heads (Pj) in the 2024 Sampang Regional Elections 68
M. Zainor Ridho

51 Social Capital and Local Community Identity in Strengthening the Politics of Village Development in North Kalimantan 69
Lusi Andriyani, Edy Delvianus Malisan, Ali Noer Zaman

PANEL 10 : Kontestasi Elektoral dan Representasi Politik 70

52 Modal Sosial, Modal Moral, dan Politik Digital Caleg Perempuan di Papua pada Pemilu 2024 70
Audra Jovani, Chontina Siahaan, Godefridus Samderubun

53 Pemilu Inklusif dalam Institusi Rehabilitasi: Adaptasi Peran KPU dalam Memfasilitasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Jiwa pada Pemilu 2024 71
Restia Nova Winata

54 Pola Trajektori Elektoral Partai Politik di Indonesia pada Pemilu 1999–2024 72
Andi Suwarko

55 Keterputusan Hubungan Representasi antara Gerakan Perempuan Akar Rumput dan Anggota Legislatif Perempuan di Wilayah Konflik Sumber Daya Alam 73
Sri Budi Eko Wardani, Esty Ekawati, Nurul Nurhandjati

56 The Quota without Cadres: Layered Discrimination Against Women in Political Parties and Election Management Bodies in West Java, Indonesia 74
Fitriyani Yuliawati, Hendra Gunawan, Nisa Khoerunisa

57 Dari Ideologi ke Elektabilitas: Konvergensi Rasionalitas Elektoral Partai Politik dalam Pilkada Calon Tunggal 2024 di Kota Surabaya 76
Darsono, Basa Alim Tualeka, Mandra Nur Alia

58 Rasionalitas Pemilih Tuna Aksara Pasca Pemilu 2024 di Kabupaten Bulukumba 77
Fajar Alamsyah

PANEL 11 : Tata Kelola, Ekonomi Politik, dan Pembangunan 78

59 The Illusion of Polycentricity: Pansus Trap, Institutional Friction, and Elite Re-bargaining in Bali's Coastal Governance 78
Gede Indra Pramana, I Ketut Putra Erawan, Ni Made Ras Amanda Gelgel

60 Political Voice Perempuan dalam Komunikasi Politik Digital: Studi Kasus Elva Farhi Qolbina dan PSI Jakarta 79

Suryani, Ahmad Ziyad Shah Al Ayyubi

61 Urgensi Pengawasan Partisipatif Masyarakat dalam Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu di Indonesia 80
Ratnia Solihah, Siti Witianti, Mohammad Fazrulzaman Azm

62 Transformasi Tata Kelola Pengaduan Masyarakat DPR RI Melalui Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat 81
Muhammad Haekal Saniarjuna

63 Analisa Program MBG (Makan Bergizi Gratis) sebagai Politik Populis Presiden /Wapres Prabowo Gibran Masa Pemerintahan 2024- 2025 dari Sudut Political Legitimacy 82
Ismiyatun, Harun, Muhammad Nuh

64 The Political Economy of Faith-Based Welfare: Muslim Politics and Social Development in Indonesia, Türkiye, and Malaysia 83
Luthfi Makhasin, Hariyadi, Wilan Humaidi

PANEL 12 : Platform Digital, AI, dan Demokrasi 84

65 Kedaulatan Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan: Evaluasi Implementasi SPBE dan Kesenjangan Digital Antardaerah di Indonesia 84
Anitha Nurak, Hendry Bakri

66 Dari Objek Pasif Menuju Aktor Kolaboratif: Studi Literatur Tentang Peran Masyarakat Digital dalam Mengakselerasi Digital Governance Daerah 85
Dwian Hartomi Akta Padma Eldo, Irwan Abdu Nugrah

67 Governing Algorithms in Southeast Asia: a Discourse Network Analysis of AI Policy Coalitions in Indonesia 86
Aditya Batara Gunawan, Muhammad Fauzan Rizki Ramadhan, Jessica Grace Mulyadi

68 Kebebasan Berekspresi di Bawah Bayang-bayang UU Ite: Analisis Kritik Satir Politik di TIKTOK dalam Demokrasi Digital Indonesia 87
Sharim Dezhneva Denalis

69 Fragmented Authority, Contested Boundaries: How Diverse Islamic Responses to the Iran–Israel War Shape Sectarian Discourse in Indonesia 88
Ari Ganjar Herdiansah, Noor Sulastry Yurni Ahmad

Jadwal Panel

Sesi	Hari	Waktu	Kode Panel	Judul Panel	Urutan	ID	Judul Artikel / Catatan	Nama Penulis
1	Senin	15.30–17.00	P01	Demokrasi, Pemilu, dan Representasi	1	002	Democracy and Islamophobic Practices in the 2024 North Sumatra Gubernatorial Election: Identity Politics and Electoral Contestation in Indonesia	Warjio, Salamudin Nasution
					2	014	Antara Surau dan Kotak Suara: Otoritas Keagamaan Sufi dan Relasi Klientelistik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia	Sadri, Valina Singka Subekti, Meidi Kosandi
					3	017	Tantangan Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2024	Ahmad Rifki Nurfebriansyah
					4	024	Evaluasi dan Strategi Penguatan Penyelenggara Pemilu Serentak 2024 di Jawa Tengah	Martien Herna Susanti, Moh. Aris Munandar
					5	035	Kontruksi Politik Identitas dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Politik pada Pilkada Kota Padang 2024	Lusi Puspika Sari, Ilham Havifi, Sadri
					6	057	Sistem Pemilu dan Korupsi di Indonesia	Mangihut Siregar, Ratna Ani Lestari, Triana Dianita Handayani
			P02	Partai Politik dan Komunikasi Politik	1	021	Potret Reformasi Pelembagaan Partai Politik: Distribusi Kekuasaan dan Demokrasi Internal pada PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan PKS	Idris Thaha, A. Bakir Ihsan, Savran Billahi
					2	036	Mengurai Anomali Elektoral di Tanah Minang: Telaah Kronologis Karakteristik Kandidat, Dinamika Kampanye, dan Kriteria Pemimpin Ideal pada Pilpres di Sumatera Barat	Fakta Lovandez Abel, Hasan Mustapa
					3	045	The Religious Narrative in the Israel-Palestine Conflict	Mhd Alfahjri Sukri, Muhammad Hizbi Islami, Ulya Fitri
					4	048	Korupsi Pemerasan Abdul Wahid Gubernur Provinsi Riau Periode 2025-2030	Doni Hendrik
					5	001	Ketika Keluarga Berencana Tidak Hanya Menjadi Urusan Perempuan: Analisis Strategi Adaptif Pemerintah dalam	Rendy Adiwilaga, Revannisa Alya Fitriani

Sesi	Hari	Waktu	Kode Panel	Judul Panel	Urutan	ID	Judul Artikel / Catatan	Nama Penulis
							Mendorong Peserta Vasektomi di Kabupaten Bandung	
					6	066	Personalisasi Politik dan Dominasi Elektoral: Efek Patronase Figur Lokal Dalam Lonjakan Suara Partai Nasdem di Kabupaten Pinrang	Endang Sari, Sakinah Nadir, Muhammad Muhammad
			P03	Politik Digital dan E-Government	1	008	Politik Algoritma TIKTOK dan Facebook: Analisis Komparatif Instrumen Soft Power dalam Rivalitas China–amerika Serikat	Andini Ayu Febrian
					2	022	Digital Transformation and Government Innovation in Public Complaint Services: E-government Effectiveness and Citizen Participation in South Tangerang City	Gefarina Djohan, Muhammad Danu Satrio
					3	032	Digital Labor Alienation Facing Platform Algorithmic Exploitation (an Analysis of Online Ride Hailing Driver Resistance in Surabaya)	Laili Bariroh, Sting Bina Tara
					4	033	Digitalisasi Surau: Regulasi Keagamaan pada Program Smart Surau di Kota Padang, Indonesia	Zulfadi, Archi Pratama, Mhd. Fajri
					5	056	Governing AI in Urban Waste Management: Adaptive Accountability and Institutional Learning in Semarang, Indonesia (2024-2026)	Ajeng Widya Prakasita
					6	063	Digital Colonialism and Muslim Political Agency: Rethinking Digital Sovereignty from the Global South	Asep Muhamad Iqbal
			P04	Gerakan Sosial dan Partisipasi Warga	1	038	Pengawasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (peti): Jaringan Kekuasaan dan Tantangan Akuntabilitas Negara di Sumatera Barat	Dewi Anggraini, Syaifuddin Islami
					2	042	Satu Undang-Undang, Dua Rancangan: Otonomi Adat dan Relasi Kuasa pada Nagari dan Desa Adat Bali	Irawati, Dewi Anggraini, Tri Oktaviana
					3	039	Citizenship and Uncertainty Regarding Spatial Rights: the Politics of Citizen Recognition in the Dupak Magersari Railway-adjacent Settlement, Surabaya	Galang Geraldy, Mandra Nur Alia, Rizca Yunike Putri
					4	043	Energy without Institutions: Structural Constraints on Opposition	Andhik Beni Saputra, Andri Rusta

Sesi	Hari	Waktu	Kode Panel	Judul Panel	Urutan	ID	Judul Artikel / Catatan	Nama Penulis
							in Post-reformasi Indonesia	
					5	047	Digital Citizenship and the Mechanisms of Contemporary Political Engagement: an Examination of the Bonatua Silalahi–Denny Indrayana Initiative for Public Institutional Responsibility	Hasan Mustapa, Mohamad Jaenudin, Muhammad Anwar Syi'arudin
					6	060	Keadilan Ekologis dalam Perspektif Politik Lingkungan: Studi Kasus over Capacity di Tpa Tamangapa Makassar	Andi G. A. Fawelau, M. A. Badri, I. N. Haerul, A. Alif, R. Analta, Muh R. W. H. Amir, Sakinah Nadir
2	Selasa	15.30–16.45	P05	Keamanan Siber, Privasi, dan Kedaulatan Digital	1	018	Political Rhetoric on Digital Sovereignty and Cybersecurity: Discursive Contestation over the Future of Indonesian Democracy	Iding Rosyidin
					2	020	Keamanan sebagai Konstruksi Kekuasaan: Reformasi POLRI dan Kebebasan Sipil dalam Demokrasi Indonesia	Muhammad Rafi Fadilah
					3	040	Bukan Sekadar Spill the Tea: Membongkar Krisis Perlindungan dan Akuntabilitas Hukum di TikTok.	Revani Angelina Mirabel, Zhahra Renitania, Regzi Cholimatus Sherin
					4	041	Kebijakan Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Siber	Sidratahta Mukhtar
					5	058	Potensi Penggunaan Pegasus Spyware sebagai Instrumen Pengawasan Digital untuk Kepentingan Politik: Studi atas Laporan Amnesty International	Husnul Isa Harahap
			P06	Literasi Politik dan Perlindungan di Era Digital	1	011	Pendidikan Politik di Era Digital: Membangun Partisipasi Anak Muda Melalui Literasi Informasi yang Kritis di Kota Palangka Raya	Alfrid Sentosa, Kur Junaidi, Betty Karya
					2	046	Kolaborasi Perlindungan Anak dalam Perspektif Politik Kesejahteraan: Studi Kasus Program KoGuRuPa di Surabaya	Rizca Yunike Putri, Sri Musrifah
					3	061	Dilema Algoritma dan Aktivisme Digital: Studi Netnografi pada Literasi Politik dan Perlindungan Anak di Instagram	Gian Sapta Ginanjar

Sesi	Hari	Waktu	Kode Panel	Judul Panel	Urutan	ID	Judul Artikel / Catatan	Nama Penulis
					4	064	Dari Konten ke Jalanan: Glorifikasi Kekerasan di Media Sosial dan Permainan Daring Serta Kerentanan Remaja Jabodetabek terhadap Tawuran dan Narasi Radikal	Indah Novitasari, Fransiskus X. Gian Tue Mali
					5	069	Kedaulatan Sinyal di Perbatasan: Studi Pendidikan Politik di Era Digital pada Masyarakat Perbatasan Indonesia-Timor Leste	Yeftha Yerianto Sabaat, Frans B.R. Humau
			P07	Transformasi Pemerintahan dan Kebijakan Publik	1	007	Melampaui Kesepakatan Antarlembaga: Tata Kelola Informal dan Kesenjangan Implementasi dalam Kebijakan Transportasi Perkotaan yang Terfragmentasi	Qurnia Indah Permata Sari, Abdul Aziz, Ahmad Sukron
					2	006	Politik Pembuatan Klaim: Negosiasi Kelas Menengah dan Praktik Kewargaan dalam Tata Kelola Kota di Indonesia	Haryanto
					3	050	Kepemimpinan Kolaboratif dan Political Entrepreneurship dalam Tata Kelola Koperasi Desa: Studi Kasus KMP Karangagung sebagai Model Pelayanan Publik Berbasis Komunitas	Ratna Ani Lestari, Mangihut Siregar, S. Agus Santosa
					4	053	Trend and Gaps dalam Kebijakan Penanggulangan Banjir di Kota Palembang: Analisis Sistematic Literature Review	Siti Anisyah
					5	070	Who Governs the Road? Ambulance Escorts and State Capacity in Indonesia, Japan, South Korea, Thailand, and India	Ali Muhyidin, Julian A. Pasha, Ardila Putri, Silvia Dian Anggraeni, Muhammad Imam
			P08	Gender, Inklusi, dan Keadilan Sosial	1	004	Gendered Digital Justice: Ai-enabled Political Abuse and the Limits of Women's Political Inclusion in Indonesia	Mashita Dewi Tidore
					2	028	Budaya Patriarki, Relasi Kuasa, dan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Kabupaten Nias	Lis Hayanti Warasi, Ainissifa, Yolanda Tambunan
					3	031	Class and Articulation: Contestation and Agency of Women Workers in Balinese Patriarchal Structures	Bandiyah, Kadek Dwita Apriani, Mashita Dewi Tidore

Sesi	Hari	Waktu	Kode Panel	Judul Panel	Urutan	ID	Judul Artikel / Catatan	Nama Penulis
					4	059	Dynasty Power of Sayye': Analisis Teori Struktural Fungsional di Tengah Hegemoni Endogamous Marriage sebagai Modernisasi Sosial pada Masyarakat Cikoang	Fadhil Perdana, Aluna Putri Sagita
					5	065	Strategic Invisibility: Women's Political Campaigns in Conservative Religious Contexts	Teuku Muzaffarsyah, M. Akmal, Naidi Faisal
3	Selasa	16.45–18.00	P09	Politik Lokal, Identitas, dan Masyarakat	1	012	Relasi Sosial dan Politik Identitas dalam Kebijakan Desentralisasi di Palangka Raya	Handi Winata, Selvi Rantika Tera Natasya
					2	013	Pengaruh Religiusitas dan Elite Politik dalam Pembangunan Tempat Hiburan di Banda Aceh	Muhammad Vikram, Annisah Putri, Rizfa Maghfirah, Reza Mahendra
					3	015	Manajemen Konflik Dualisme Pusat Pemerintahan di Kabupaten Buton Utara	Inan Fauziyah, Ibrayoga Rizki Perdana
					4	034	New Autonomous Region Or Stronger Service Delivery? a Comparative Policy Framework from Bogor Selatan, Indonesia	Mudiyati Rahmatunnisa, Nanang Suryana
					5	027	Resistensi Politik Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Barat terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla	Herri Junius Nge, Ahirul Habib Padila, Kartoyo Antonius
					6	051	Democratic Backsliding at the Local Level: the Appointment of Acting Village Heads (Pj) in the 2024 Sampang Regional Elections	M. Zainor Ridho
					7	067	Social Capital and Local Community Identity in Strengthening the Politics of Village Development in North Kalimantan	Lusi Andriyani, Edy Delvianus Malisan, Ali Noer Zaman
			P10	Kontestasi Elektoral dan Representasi Politik	1	010	Modal Sosial, Modal Moral, dan Politik Digital Caleg Perempuan di Papua pada Pemilu 2024	Audra Jovani, Chontina Siahaan, Godefridus Samderubun
					2	023	Pemilu Inklusif dalam Institusi Rehabilitasi: Adaptasi Peran KPU dalam Memfasilitasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Jiwa pada Pemilu 2024	Restia Nova

Sesi	Hari	Waktu	Kode Panel	Judul Panel	Urutan	ID	Judul Artikel / Catatan	Nama Penulis
					3	025	Pola Trajektori Elektoral Partai Politik di Indonesia pada Pemilu 1999–2024	Andi Suwarko
					4	029	Keterputusan Hubungan Representasi antara Gerakan Perempuan Akar Rumput dan Anggota Legislatif Perempuan di Wilayah Konflik Sumber Daya Alam	Sri Budi Eko Wardani, Esty Ekawati, Nurul Nurhandjati
					5	037	The Quota without Cadres: Layered Discrimination Against Women in Political Parties and Election Management Bodies in West Java, Indonesia	Fitriyani Yuliawati, Hendra Gunawan, Nisa Khoerunisa
					6	049	Dari Ideologi ke Elektabilitas: Konvergensi Rasionalitas Elektoral Partai Politik dalam Pilkada Calon Tunggal 2024 di Kota Surabaya	Darsono, Basa Alim Tualeka, Mandra Nur Alia
					7	062	Rasionalitas Pemilih Tuna Aksara Pasca Pemilu 2024 di Kabupaten Bulukumba	Fajar Alamsyah
			P11	Tata Kelola, Ekonomi Politik, dan Pembangunan	1	016	The Illusion of Polycentricity: Pansus Trap, Institutional Friction, and Elite Re-bargaining in Bali's Coastal Governance	Gede Indra Pramana, I Ketut Putra Erawan, Ni Made Ras Amanda Gelgel
					2	019	Political Voice Perempuan dalam Komunikasi Politik Digital: Studi Kasus Elva Farhi Qolbina dan PSI Jakarta	Suryani, Ahmad Ziyad Shah Al Ayyubi
					3	026	Urgensi Pengawasan Partisipatif Masyarakat dalam Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu di Indonesia	Ratnia Solihah, Siti Witianti, Mohammad Fazrulzaman Azm
					4	052	Transformasi Tata Kelola Pengaduan Masyarakat DPR RI Melalui Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat	Muhammad Haekal Saniarjuna
					5	054	Analisa Program MBG (Makan Bergizi Gratis) sebagai Politik Populis Presiden /Wapres Prabowo Gibran Masa Pemerintahan 2024-2025 dari Sudut Political Legitimacy	Ismiyatun, Harun, Muhammad Nuh
					6	055	The Political Economy of Faith-Based Welfare: Muslim Politics and Social Development in Indonesia, Türkiye, and Malaysia	Luthfi Makhasin, Hariyadi, Wilan Humaidi

Sesi	Hari	Waktu	Kode Panel	Judul Panel	Urutan	ID	Judul Artikel / Catatan	Nama Penulis
			P12	Platform Digital, AI, dan Demokrasi	1	003	Kedaulatan Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan: Evaluasi Implementasi SPBE dan Kesenjangan Digital Antardaerah di Indonesia	Anitha Nurak, Hendry Bakri
					2	005	Dari Objek Pasif Menuju Aktor Kolaboratif: Studi Literatur Tentang Peran Masyarakat Digital dalam Mengakselerasi Digital Governance Daerah	Dwian hartomi Akta Padma Eldo, Irwan Abdu Nugrah
					3	009	Governing Algorithms in Southeast Asia: a Discourse Network Analysis of AI Policy Coalitions in Indonesia	Aditya Batara Gunawan, Muhammad Fauzan Rizki Ramadhan, Jessica Grace Mulyadi
					4	044	Kebebasan Berekspresi di Bawah Bayang-bayang UU Ite: Analisis Kritik Satir Politik di TIKTOK dalam Demokrasi Digital Indonesia	Sharim Dezhneva Denalis
					5	068	Fragmented Authority, Contested Boundaries: How Diverse Islamic Responses to the Iran–Israel War Shape Sectarian Discourse in Indonesia	Ari Ganjar Herdiansah, Noor Sulastry Yurni Ahmad

PANEL 1 - Demokrasi, Pemilu, dan Representasi

Democracy and Islamophobic Practices in the 2024 North Sumatra Gubernatorial Election: Identity Politics and Electoral Contestation in Indonesia

Warjio, Salamudin Nasution, Edy Iriawan

This study examines the relationship between democratic electoral processes and Islamophobic practices in the 2024 North Sumatra gubernatorial election, with particular attention to how religious identity was constructed, contested, and instrumentalized during political competition. It seeks to explore the forms of Islamophobic narratives that emerged in electoral discourse, the actors involved in their dissemination, and their implications for democratic inclusiveness and political participation. Employing a qualitative case study approach, the research analyzes campaign materials, candidates' public statements, media coverage, social media content, and public discourse related to the 2024 gubernatorial election in North Sumatra. Data were collected through document analysis and digital media observation, while thematic analysis was used to identify patterns of Islamophobic representation, political framing, and identity-based mobilization. The findings indicate that Islamophobic practices were manifested primarily through indirect forms of stigmatization, negative stereotyping, and political framing that portrayed Islamic symbols, organizations, or expressions of Muslim political identity as potential threats to pluralism, moderation, or democratic stability. These narratives were strategically employed by political actors and amplified through digital communication platforms to influence voter perceptions and shape electoral preferences. The study further reveals that such practices contributed to political polarization, reinforced social divisions, and limited the quality of democratic deliberation by shifting public attention from policy issues to identity-based contestation. At the same time, countervailing efforts from civil society groups, religious leaders, and pro-democracy actors promoted tolerance, interfaith dialogue, and inclusive political participation. The study concludes that Islamophobic practices, although often subtle and embedded within broader political narratives, represent a significant challenge to democratic consolidation in multicultural societies. The findings demonstrate that electoral competition can become a vehicle for reproducing religious prejudice and exclusion when identity-based mobilization is prioritized over substantive policy debate. Nevertheless, the resilience of democratic institutions and civic actors in North Sumatra suggests that inclusive democratic norms remain capable of mitigating the divisive effects of Islamophobia. This research contributes to the literature on democracy, identity politics, and religious discrimination by highlighting how Islamophobic discourse functions as a political strategy within local electoral contexts and by emphasizing the need for stronger democratic safeguards, civic education, and ethical political communication to ensure fair, inclusive, and pluralistic electoral processes in Indonesia.

Keywords: Democracy; Islamophobia; Identity Politics; Gubernatorial Election; North Sumatra; Electoral Politics; Indonesia.

Antara Surau dan Kotak Suara: Otoritas Keagamaan Sufi dan Relasi Klientelistik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Sadri, Valina Singka Subekti, Meidi Kosandi

Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana otoritas keagamaan Sufi, khususnya jaringan Tarekat Syathariyah, membentuk relasi klientelistik dalam pemilihan kepala daerah serta menjelaskan bagaimana posisi patron, broker, dan klien berubah ketika hubungan sosial-keagamaan berinteraksi dengan arena elektoral. Studi ini berangkat dari persoalan bahwa klientelisme elektoral tidak selalu berlangsung melalui pertukaran uang dan suara, tetapi dapat memanfaatkan otoritas keagamaan, jaringan sosial, identitas, kepercayaan, serta sumber daya kolektif. Penelitian menggunakan desain studi kasus kualitatif dengan perbandingan intra-kasus pada Pilkada Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan lebih dari 15 informan yang terdiri atas tuanku dan syekh, pimpinan pesantren, jamaah, kandidat, anggota tim kampanye, pengurus partai, dan pengamat lokal. Pengumpulan data dilakukan pada September 2022–Februari 2023 dan dilengkapi dengan wawancara triangulasi pada April–Mei 2025. Data wawancara dianalisis bersama dokumen KPU, unggahan media sosial kandidat dan tim kampanye, laporan media, serta studi terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan Tarekat Syathariyah tidak bertindak sebagai blok politik yang homogen, tetapi terfragmentasi ke dalam konfigurasi dukungan terhadap kandidat yang berbeda. Temuan utama memperlihatkan adanya pembalikan peran lintas-arena, yani aktor yang berada pada posisi murid dalam hierarki keagamaan dapat menjadi patron dalam arena elektoral karena menguasai sumber daya politik, anggaran, nominasi, dan akses kebijakan, sedangkan guru atau pemimpin tarekat dapat berfungsi sebagai broker karena memiliki otoritas spiritual, kredibilitas, modal simbolik, serta jaringan mobilisasi. Pertukaran klientelistik juga tidak terbatas pada sumber daya material individual, tetapi mencakup barang kolektif, jasa masa lalu, janji kebijakan, identitas santri, silsilah keilmuan, amanah, pengakuan, dan reputasi. Dalam konteks tersebut, otoritas keagamaan dapat dikonversi menjadi modal elektoral melalui mekanisme brokerage, sementara jamaah tetap memiliki agensi meskipun pilihan politiknya berlangsung dalam struktur norma, loyalitas, dan ekspektasi sosial komunitas. Penelitian menyimpulkan bahwa klientelisme keagamaan perlu dipahami sebagai relasi yang bersifat relasional dan spesifik terhadap arena, bukan sebagai atribut tetap seorang aktor. Temuan ini memperluas kajian religious clientelism dengan menunjukkan bahwa pemimpin agama tidak selalu berperan sebagai patron, melainkan dapat menjadi broker, serta bahwa mobilisasi berbasis jaringan tarekat memiliki konsekuensi ganda, yaitu memperluas akses dan partisipasi politik sekaligus berpotensi mempolitisasi otoritas spiritual, membatasi otonomi lembaga keagamaan, dan menghasilkan polarisasi intra-tarekat.

Kata kunci: klientelisme keagamaan; brokerage elektoral; jaringan Sufi; Tarekat Syathariyah; otoritas keagamaan; modal simbolik; Pilkada Padang Pariaman.

Tantangan Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2024

Ahmad Rifki Nurfebriansyah

Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan demokrasi Indonesia pasca Pemilu 2024 serta memproyeksikan arah perkembangan demokrasi selama lima tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Kajian ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan penurunan indeks demokrasi Indonesia dan berbagai kontroversi elektoral yang memunculkan kekhawatiran mengenai integritas pemilu, supremasi hukum, dan kualitas tata kelola demokratis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang memanfaatkan artikel ilmiah, laporan indeks demokrasi, dan pemberitaan media daring mengenai dinamika politik Indonesia dalam lima tahun terakhir. Analisis dilakukan melalui sintesis literatur, penelaahan fenomena politik, serta perbandingan dengan pengalaman negara lain untuk mengidentifikasi pola dan memproyeksikan potensi kemunduran demokrasi. Kerangka analisis mengacu pada pemikiran Robert A. Dahl, Amartya Sen, serta Daron Acemoglu dan James A. Robinson, yang dioperasionalkan ke dalam lima indikator utama, yaitu integritas pemilu, supremasi hukum, transparansi pemerintahan, mekanisme checks and balances, dan kebebasan berekspresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia menghadapi kerentanan pada kelima indikator tersebut. Kontroversi pemilu 2024 mengindikasikan risiko berlanjutnya persoalan integritas electoral, perubahan aturan politik yang berorientasi pada kepentingan elite berpotensi melemahkan supremasi hukum, proses pengambilan keputusan yang kurang transparan dapat mengurangi akuntabilitas dan kepercayaan publik, kecenderungan perluasan koalisi pemerintahan berisiko mempersempit ruang oposisi dan pengawasan legislatif, sedangkan penggunaan instrumen hukum yang berpotensi membatasi ekspresi serta tindakan represif terhadap demonstrasi dapat mengancam kebebasan sipil. Perbandingan dengan Uganda, Rusia, Kenya, dan Myanmar memperlihatkan sejumlah pola yang relevan untuk memahami risiko konsolidasi kekuasaan dan kemunduran demokrasi, meskipun Indonesia memiliki karakteristik atau keunikan tersendiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia berpotensi mengalami kemunduran lebih lanjut apabila kelemahan institusional tersebut tidak diimbangi dengan penguatan akuntabilitas, independensi lembaga peradilan, transparansi pemerintahan, oposisi politik, dan perlindungan kebebasan sipil. Secara teoretis penelitian ini menegaskan pentingnya memahami kemunduran demokrasi sebagai proses yang dapat berlangsung melalui manipulasi instrumen hukum dan pelemahan institusi formal tanpa harus menghapus mekanisme demokrasi secara terbuka. Secara praktis temuan ini menekankan perlunya reformasi kelembagaan, pengawasan masyarakat sipil, serta perlindungan terhadap media dan kebebasan berekspresi.

Kata kunci: Demokrasi; Tantangan; Kemunduran Demokrasi; Integritas Pemilu

Evaluasi dan Strategi Penguatan Penyelenggara Pemilu Serentak 2024 di Jawa Tengah

Martien Herna Susanti, Moh. Aris Munandar

Pemilu merupakan instrumen strategis untuk memilih pemimpin di negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dan penyelenggara pemilu bertanggung jawab tidak hanya atas pelaksanaan teknis, tetapi juga atas terjaganya kesesuaian pemilu dengan standar etika, hukum, dan nilai-nilai demokrasi. Penelitian ini mengevaluasi kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di Jawa Tengah dengan (1) mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam penyelenggaraannya dan (2) merumuskan strategi untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu ke depan agar selaras dengan nilai etika dan demokrasi. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling dan terdiri atas anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah, akademisi, dan masyarakat pemilih. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, diuji keabsahannya dengan triangulasi, dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif interaktif. Masalah utama dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di Jawa Tengah mencakup persoalan teknis, administratif, etika, dan koordinasi kelembagaan. Strategi perbaikan yang dapat dilakukan meliputi penguatan kapasitas dan profesionalitas penyelenggara, digitalisasi proses pemilu yang transparan dan akuntabel, penerapan kode etik yang disertai pengawasan partisipatif, sinergi antarlembaga penyelenggara, serta peningkatan literasi demokrasi masyarakat. Kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh faktor teknis, etis, dan kelembagaan. Ketidaktepatan administrasi, lemahnya etika penyelenggara, dan rendahnya literasi politik masyarakat mencerminkan belum terintegrasinya nilai demokrasi substantif dalam praktik elektoral, sehingga pembenahan pemilu perlu menyentuh penguatan kapasitas penyelenggara, akuntabilitas etik, dan keterlibatan publik secara bersamaan.

Kata kunci: evaluasi pemilu; penyelenggara pemilu; Pemilu Serentak 2024; etika penyelenggara; demokrasi substantif

Kontruksi Politik Identitas dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Politik pada Pilkada Kota Padang 2024

Lusi Puspika Sari, Ilham Havifi, Sadri

The strengthening of identity politics in Indonesia's local political contestation indicates that social, cultural, and religious identities remain strategic instruments in shaping voters' political decisions. This study examines the construction of political identity by the Fadly Amran-Maigus Nasir pair in the 2024 Padang City Mayoral Election, employing a sequential exploratory mixed-methods design that prioritizes qualitative inquiry to reconstruct the identity construction process prior to quantitative testing of its influence on voter decisions. The qualitative phase involved in-depth interviews with a religious leader, core campaign team members, and volunteers, analyzed using hybrid thematic analysis grounded in Manuel Castells' identity construction theory and Donald L. Horowitz's identity mobilization theory. Findings reveal that the candidates' religious-cultural identity was deliberately constructed by campaign elites—through references to regional development policy frameworks, audience-based symbol adjustment, and the mobilization of institutional symbolic capital beyond formal religious domains—yet was frequently perceived by the actors themselves as organic rather than engineered. A more significant finding indicates that political identity functions as a reinforcing factor rather than a sole determinant of electoral victory, as grassroots mobilization networks and material-needs-based program offerings proved more decisive in shaping voter decisions. The study further identifies a consistent perception gap between strategic-level actors (more skeptical of identity's centrality) and grassroots-level actors (more convinced of its centrality). These findings contribute theoretically by extending Castells' concept of legitimizing identity through the pathway of formal policy legitimation, while modifying Horowitz's zero-sum assumption regarding identity mobilization in plural societies. The findings inform the development of the survey instrument for the subsequent quantitative phase, aimed at empirically testing the proportional influence of political identity on Padang City voters' behavior.

Keywords: identity politics; identity construction; identity mobilization; voting behavior; local election

Sistem Pemilu dan Korupsi di Indonesia

Mangihut Siregar, Ratna Ani Lestari, Triana Dianita Handayani

Tingginya biaya politik yang telah berlangsung di Indonesia sudah dikeluhkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat umum serta mereka yang ikut berkontestasi dalam pesta demokrasi. Setiap ada perhelatan pesta demokrasi wacana biaya politik yang tinggi selalu muncul. Masalah ini hanya sebatas keluhan dan pembicaraan tanpa ada tindakan nyata dari pihak yang berwenang untuk mengatasinya. Tulisan ini mengkaji keterkaitan sistem pemilu yang berlaku saat ini dengan tingginya korupsi di Indonesia. Mereka yang terjun dalam arena pemilihan menggunakan modal yang dimiliki. Modal seperti yang dimaksud Bourdieu ada 4 meliputi: modal budaya, modal sosial, modal ekonomi dan modal simbolik. Modal-modal ini sangat menentukan kemenangan seseorang dalam ranah. Sistem pemilu terbuka menjadikan para konstentan bertarung secara bebas. Modal yang paling mudah dipraktikkan adalah modal ekonomi. Ekonomi dalam bentuk uang atau barang lainnya lebih menarik bagi masyarakat yang mempunyai ekonomi menengah ke bawah. Pesta demokrasi menjadi ajang praktik politik uang. Modal ekonomi menjadi penentu untuk menjatuhkan pilihan bagi calon pemilih. Modal yang sudah dihabiskan selama kampanye perlu dikembalikan setelah menjabat. Implikasinya praktik pemilu dari hari ke hari semakin mahal sehingga korupsi semakin tinggi.

Kata kunci: sistem pemilu, biaya politik tinggi, modal, korupsi

PANEL 2 – Partai Politik dan Komunikasi Politik

Potret Reformasi Pelembagaan Partai Politik: Distribusi Kekuasaan dan Demokrasi Internal pada PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan PKS

Idris Thaha, A. Bakir Ihsan, Savran Billahi

Pasca-Reformasi 1998, liberalisasi sistem kepartaian di Indonesia belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan pelembagaan partai politik, terutama dalam praktik demokrasi internal. Penelitian ini bertujuan menjelaskan mengapa praktik demokrasi internal berbeda di antara partai politik meskipun beroperasi dalam kerangka regulasi yang sama, yakni UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Secara khusus, penelitian ini mengkaji bagaimana karakter organisasi memengaruhi seleksi kepemimpinan, distribusi kekuasaan, dan partisipasi kader dalam pengambilan keputusan partai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain komparatif Most Similar Systems Design (MSSD). Studi ini membandingkan PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang memiliki karakter organisasi berbeda: personalistik, oligarkis-institusional, dan kader berbasis ideologi. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi terbatas, serta dianalisis dengan membandingkan mekanisme pengambilan keputusan dan distribusi kekuasaan di setiap partai. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi bagaimana perbedaan karakter organisasi, struktur kepemimpinan, dan mekanisme kaderisasi menghasilkan variasi praktik demokrasi internal di antara ketiga partai. Analisis komparatif juga diharapkan menjelaskan interaksi antara kerangka regulasi yang berlaku dan dinamika kekuasaan internal dalam membentuk tingkat pelembagaan partai politik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian komparatif tentang pelembagaan partai politik dengan menunjukkan pentingnya faktor organisasi dalam menjelaskan variasi demokrasi internal. Hasil temuan juga berkontribusi menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan yang tidak hanya menekankan kepatuhan formal terhadap regulasi, tetapi juga mendorong demokratisasi pengambilan keputusan, akuntabilitas kepemimpinan, dan partisipasi kader dalam partai politik di Indonesia.

Kata kunci: Intra-Party Democracy; Party Institutionalization; PDI Perjuangan; Golkar Party; Prosperous Justice Party (PKS)

Mengurai Anomali Elektoral di Tanah Minang: Telaah Kronologis Karakteristik Kandidat, Dinamika Kampanye, dan Kriteria Pemimpin Ideal pada Pilpres di Sumatera Barat

Fakta Lovandez Abel, Hasan Mustapa

Fenomena pemilihan presiden di Provinsi Sumatera Barat selama dua dekade terakhir, yaitu dari tahun 2004 hingga 2024, menunjukkan pola pemilihan yang berubah-ubah dan memperlihatkan isu-isu penting yang berbeda dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Wilayah ini memiliki perubahan pengaruh suara yang sangat besar dan tidak ada partai politik tertentu yang selalu mendominasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku pemilih di Sumatera Barat dengan melihat urutan perolehan suara yang dipengaruhi oleh sifat pribadi calon pemimpin, mengevaluasi cara kampanye yang digunakan, serta menentukan standar atau kriteria bagi seorang pemimpin yang memiliki peluang besar untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Minang menjelang Pemilu Presiden 2029. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, data sekunder diperoleh melalui studi dokumen hasil resmi pemilu, tinjauan pustaka tentang sosiologi dan politik masyarakat Minangkabau, serta analisis teks opini tokoh masyarakat yang terdapat di media massa. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan suara di Sumatera Barat dipengaruhi oleh aturan ketat yang berdasarkan nilai-nilai etis dan budaya, yang berasal dari filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Pada tahun 2004 dan 2009, orang-orang Minang lebih memilih tokoh yang memiliki karakter pintar, sopan, dan berpengetahuan, seperti SBY dan Amien Rais. Pola ini berubah pada tahun 2014 dan 2019, dengan munculnya karakteristik figur yang tegas dan konsisten dalam mengambil posisi di luar pemerintahan atau sebagai oposisi, seperti Prabowo Subianto. Namun dalam Pemilu Presiden 2024, terjadi perpindahan suara secara besar-besaran ke Anies Baswedan, yang menunjukkan adanya kecenderungan pemilih untuk menyalahkan figur yang dianggap melakukan kesepakatan politik hanya demi meraih kekuasaan. Di sisi lain, kampanye yang berhasil di daerah ini harus berfokus pada perdebatan yang berdasarkan ide-ide kuat dan melewati pengaruh dari tokoh informal Tigo Tungku Sajarangan (Niniak Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai), sementara strategi populis dan gimmick politik justru ditolak oleh masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa loyalitas politik di Sumatera Barat mudah berubah mengikuti tokoh, tetapi sangat kuat terhadap nilai-nilai moralitas. Berdasarkan pola sejarah yang ada, kriteria seorang calon pemimpin yang diperkirakan akan mendapatkan dukungan di Sumatera Barat pada pemilihan presiden 2029 adalah sosok yang memiliki latar belakang akademik yang jelas, bisa berkomunikasi dengan jelas dan memiliki makna, bertekad kuat menjalankan nilai-nilai keagamaan, serta berani memberikan kritik dan mendorong perubahan terhadap kekuasaan di level pusat yang saat ini berlangsung.

Kata Kunci: Perilaku Pemilih; Pemilihan Presiden; Sumatera Barat; Budaya Politik Minangkabau; Strategi Kampanye

The Religious Narrative in the Israel-Palestine Conflict

Mhd Alfahjri Sukri, Muhammad Hizbi Islami, Ulya Fitri

This study aims to explain the historical roots of religious narratives in the Israel-Palestine conflict and the factors contributing to the persistence of religious narratives in every Israel-Palestine conflict. A qualitative method is employed in this study, utilizing the concept of the politicization of religion and framing theory to analyze how religious narratives are constructed, mobilized, and reproduced by religious and political actors. Data were sourced from books, journals, articles, reports, papers, news from mainstream media, and social media. The findings indicate that religious narratives in the Israel-Palestine conflict cannot be detached from interpretations of sacred texts and historical memory. The Zionist movement, whose early phase was claimed to be secular, constructed its national identity and legitimacy from Jewish religious heritage concerning the "Promised Land." Meanwhile, the Islamic narrative grew increasingly robust and developed within the historical context of the Palestinian struggle against Israel. Both claim to be the legitimate owners based on historico-religious assertions. However, at present, religious narratives are extensively employed by Israel to legitimize their actions against the Palestinian people. Religious narratives persist and continue to develop due to mobilization through interpretations by both Islamic and Jewish religious figures, which are disseminated to their respective followers. These narratives are exploited by politicians as legitimation for their actions. Meanwhile, the development of social media plays a role in reinforcing and accelerating the spread of this contestation of religious narratives. This study contributes to the field of Political Science, particularly regarding how religious identity is mobilized alongside nationalism and political factors in conflict. This may have implications for the rise of Islamophobia and antisemitism.

Keywords: religious narratives, Zionism, framing, Israel-Palestine conflict

Korupsi Pemerasan Abdul Wahid Gubernur Provinsi Riau Periode 2025-2030

Doni Hendrik

Perilaku korupsi Gubernur Riau Abdul Wahid yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di pertengahan tahun 2025 merupakan kasus korupsi yang berulang terjadi pada Gubernur Riau. Hal ini kemudian menjadi viral dan menyita perhatian nasional. Fenomena korupsi ini kemudian melatarbelakangi penelitian ini mengapa korupsi terus terjadi di Riau, karena fenomena ini merupakan sesuatu record quattrick bagi Gubernur Riau yang menjadi 4 Gubernur terdakwa tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif serta teknik pengumpulan data indepth interview serta dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa perilaku kejahatan korupsi pemerasan tersebut menggunakan modus dan perilaku pemerasan oleh Gubernur kepada pejabat birokrasinya sendiri dilingkungan dinas PUPR Provinsi Riau. Tindak pidana korupsi ini dilakukan secara tidak langsung dan melalui jaringan politik dan jaringan birokrasi. Peneliti kemudian menyimpulkan bahwa terdapat tindak korupsi yang berhubungan erat dengan konsep klientalisme politik dan klientalisme birokrasi.

Kata Kunci: Korupsi, Pemerasan, Klientalisme politik, Klientalisme birokrasi

Ketika Keluarga Berencana Tidak Hanya Menjadi Urusan Perempuan: Analisis Strategi Adaptif Pemerintah dalam Mendorong Peserta Vasektomi di Kabupaten Bandung

Rendy Adiwilaga, Revannisa Alya Fitriani

Partisipasi pria dalam program Keluarga Berencana di Kabupaten Bandung masih menghadapi hambatan yang tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan layanan. Mitos bahwa vasektomi sama dengan kebiri, persepsi bahwa Keluarga Berencana (KB) merupakan urusan perempuan, keterbatasan akses dan tenaga medis, serta belum meratanya sosialisasi turut memengaruhi keputusan pria untuk menjadi peserta KB. Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DALDUKPPA) telah merespons persoalan tersebut melalui koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi, pelayanan KB serentak, dan penguatan Paguyuban Pria sebagai role model. Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa pendekatan tersebut menghasilkan pembelajaran penting: calon akseptor tidak merespons informasi dengan cara yang seragam. Sebagian bersifat curiosity-driven, aktif mencari informasi secara mandiri, sementara sebagian lainnya lebih role-model-driven, yakni lebih mudah memperoleh keyakinan melalui pengalaman sesama akseptor. Namun, strategi adaptif tersebut masih lebih kuat pada aspek teknis, administratif, dan pencapaian target kuantitatif dibandingkan perubahan norma sosial dan gender jangka panjang. Pengetahuan mengenai karakter masyarakat juga masih banyak menjadi tacit knowledge pada pelaksana dan belum sepenuhnya terlembaga dalam sistem evaluasi.

Kata kunci: Strategi Adaptif, Partisipasi Pria, Keluarga Berencana, Vasektomi, DALDUKPPA

Personalisasi Politik dan Dominasi Elektoral: Efek Patronase Figur Lokal Dalam Lonjakan Suara Partai Nasdem di Kabupaten Pinrang

Endang Sari, Sakinah Nadir, Muhammad Muhammad

Dinamika pemilu di tingkat lokal semakin menunjukkan kecenderungan personalisasi politik, di mana kinerja elektoral partai politik sangat bergantung pada figur sentral dan jaringan patronase ketimbang pelembagaan organisasi formal. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana efek patronase dan personalisasi politik figur lokal mendorong lonjakan suara signifikan Partai NasDem di Kabupaten Pinrang pada Pemilihan Umum Legislatif 2024, dengan menggunakan teori personalisasi politik dan patronase-klientelisme. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus DPD Partai NasDem, anggota DPRD terpilih, pihak KPU, dan pemilih lokal, yang dikombinasikan dengan data sekunder berupa dokumen rekapitulasi resmi KPU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan suara Partai NasDem yang dramatis, dari 20.437 suara (4 kursi) pada Pemilu 2019 menjadi 64.705 suara (11 kursi) pada Pemilu 2024, merupakan hasil dari coattail effect dan intervensi patronase figur sentral, khususnya Rusdi Masse (RMS). Figur tersebut memanfaatkan modal sosial-ekonomi melalui jaringan bantuan sosial yang dibingkai sebagai “Politik Kemanusiaan” serta memicu fenomena party switching dari politisi lokal berpengaruh. Keberhasilan ini mengantarkan Partai NasDem merebut posisi Ketua DPRD dan hak mengusung calon kepala daerah tanpa koalisi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dominasi elektoral NasDem di Pinrang merupakan bentuk kemenangan berbasis personalisasi politik (strongman-driven victory), yang menempatkan figur lokal sebagai jangkar utama elektoral, sementara kelembagaan partai berfungsi sekadar sebagai instrumen administratif penopang calon. Kajian ini memberikan kontribusi teoritis bagi literatur Ilmu Politik mengenai dinamika pelembagaan partai dan klientelisme di tingkat lokal pasca-Pemilu 2024.

Kata kunci: personalisasi politik; patronase; coattail effect; Partai NasDem; Pemilu 2024; Kabupaten Pinrang

PANEL 3 - Politik Digital dan E-Government

Politik Algoritma TIKTOK dan Facebook: Analisis Komparatif Instrumen Soft Power dalam Rivalitas China–amerika Serikat

Andini Ayu Febrian

Digital platforms have become key instruments of soft power competition between the United States and China, with TikTok and Facebook standing as the clearest embodiments of two divergent algorithmic and political models. This study examines how the algorithmic politics of TikTok and Facebook operate within the China–United States soft power rivalry, and identifies the factors that shape those algorithmic politics. Using a qualitative, library-based approach grounded in a non-positivist paradigm and a structuralist perspective, this research applies a Most Different Systems Design (MDSD) to compare the two platforms across four dimensions: state level, economic level, individual/society level, and cybersecurity level. Data were drawn from primary documents (leaked internal files, congressional testimony, court rulings, and national legislation) and secondary scholarly literature, analyzed through Krippendorff's content analysis combined with Creswell and Poth's data analysis spiral. The findings show that both platforms function as instruments of state-aligned algorithmic power, yet through structurally different mechanisms: Facebook's social-graph architecture is intervened upon through legal and market-based channels, while TikTok's interest-graph architecture has historically been shaped by direct state–corporate entanglement under Chinese law, a condition partially reconfigured following the 2026 divestiture of TikTok's United States operations. This research argues that algorithmic design is never neutral; it is a codified expression of the political economy and regulatory regime of its country of origin, which makes platform algorithms a central and increasingly contested arena of twenty-first century geopolitics.

Keywords: Algorithmic Politics, Soft Power, TikTok, Facebook

Digital Transformation and Government Innovation in Public Complaint Services: E-government Effectiveness and Citizen Participation in South Tangerang City

Gefarina Djohan, Muhammad Danu Satrio

Digital transformation has become a key strategy for fostering public service innovation, transparency, and citizen participation, yet its success depends not only on technological platforms but also on institutional capacity, bureaucratic responsiveness, and meaningful state–citizen interaction. Digital public complaint services are central in this regard, serving as a two-way communication channel between government and citizens and as a mechanism for identifying public service problems. This study analyzes the effectiveness of e-government implementation in public complaint services in South Tangerang City and identifies the factors influencing the optimization of digital innovation and citizen participation. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through unstructured interviews, observation, and documentation of the complaint services managed by the Department of Communication and Informatics of South Tangerang City. The analysis applies Indrajit's e-government success model (support, capacity, and value), complemented by Campbell's theory of organizational effectiveness and Denhardt and Denhardt's New Public Service paradigm. The findings show an increase in complaint resolution during 2022–2024, indicating the potential of digital channels to broaden public access to complaint mechanisms and to support more systematic complaint management. However, egovernment implementation remains suboptimal due to weak system integration across Regional Government Organizations (Organisasi Perangkat Daerah/OPD), limited information technology capacity among personnel, uneven public outreach, and digital infrastructure constraints. Consequently, higher resolution rates do not automatically ensure response quality, consistent follow-up, or inclusive citizen engagement. The study concludes that the effectiveness of digital complaint services rests on the interplay between technological innovation, institutional readiness, and citizen participation. It contributes to digital governance studies by arguing that digital government transformation should be assessed not merely by platform use and resolution rates, but by the state's capacity to respond to citizens' concerns consistently and accountably, a key condition for democratic responsiveness in the digital era. Practically, the findings call for stronger interoperability among complaint systems, improved competencies of public officials, broader digital literacy, and transparent monitoring and evaluation mechanisms to build public trust and participatory, inclusive, and citizen-centered digital governance.

Keywords: digital transformation; government innovation; e-government; citizen participation; public complaint services

Digital Labor Alienation Facing Platform Algorithmic Exploitation (an Analysis of Online Ride Hailing Driver Resistance in Surabaya)

Laili Bariroh, Sting Bina Tara

This study elaborates on the resistance of online ride-hailing drivers facing digital transportation platform partnership schemes. These schemes create new employment relationships and place drivers in a vulnerable position relative to platform operator dominance. Algorithmic systems, fare changes, and unilaterally determined incentive policies give rise to dissatisfaction and trigger resistance among platform workers. This study aims to analyze forms of labor exploitation, surplus value extraction, and algorithmic alienation experienced by online motorcycle taxi drivers, as well as the process of class consciousness formation and collective resistance. This research utilizes Christian Fuchs's digital capitalism theory to examine the relationship between state, platform operators, and online ride-hailing drivers. The researcher also employs James Scott's concept of Weapons of The Weak to understand forms of both hidden and open resistance carried out by drivers against platform operators. The research methodology used is qualitative, with the data collected through in-depth interviews with informants categorized as follows: online drivers, the DOBRAK online driver community, the FRONTAL Alliance, and members of Commission D of DPRD Surabaya, reinforced by non-participant observation. The findings of this study are as follows, first, online ride-hailing platform operators extract surplus value by transferring all operational costs and occupational risks onto drivers, leaving drivers without a bargaining position. This condition creates driver alienation from the labor process, the product of labor, and fellow workers. The state occupies a weak position in this context. Second, driver resistance occurs through everyday resistance, such as strategically reading algorithmic patterns, working across multiple platforms, and building solidarity through WhatsApp groups and informal meetups as spaces for hidden transcripts. This resistance serves as a decommodification of labor relations and a negotiation for structural justice within the platform economy ecosystems. This collective consciousness then transformed into organized action through the DOBRAK community within the East Java FRONTAL alliance during a demonstration on May 20, 2025, which involved 6.500 online drivers. This study concludes toward an open, collective movement as a form of structural negotiation against the dominance of digital platform capitalism.

Keywords: Digital Capitalism, digital labour, alghorithmic exploitation, collective resistance

Digitalisasi Surau: Regulasi Keagamaan pada Program Smart Surau di Kota Padang, Indonesia

Zulfadi, Archi Pratama, Mhd. Fajri

Populisme Islam tidak hanya menjadi fenomena nasional, tetapi juga membentuk dinamika politik lokal dan menentukan arah kebijakan keagamaan melalui regulasi dan program pemerintah daerah. Studi ini menganalisis bagaimana populisme Islam bekerja melalui Program Smart Surau di Kota Padang, yaitu kebijakan yang memadukan teknologi digital, pendidikan keagamaan, dan pengelolaan surau. Artikel ini menjawab tiga pertanyaan, pertama, bagaimana populisme Islam diartikulasikan dalam rancangan dan pelaksanaan Program Smart Surau. Kedua, bagaimana program tersebut mengadaptasi dan mentransformasi lembaga keagamaan serta adat istiadat yang telah ada? Ketiga, bagaimana pemerintah daerah meregulasi aktivitas keagamaan melalui program ini? Penelitian ini menggunakan desain studi kasus kualitatif. Data dikumpulkan pada wawancara mendalam serta analisis dokumen kebijakan program smart surau di Kota Padang. Hasil penelitian tersebut berupa populisme Islam diartikulasikan melalui pembingkaian program dengan simbol dan seruan moral Islam yang memosisikan pemerintah daerah sebagai pembela nilai-nilai keagamaan. Kedua, program ini merupakan adaptasi dan transformasi dari surau tradisional, yang secara historis menjadi pusat pembelajaran Islam dalam masyarakat Minangkabau, menjadi lembaga yang dikelola secara digital. Ketiga, Program ini memperluas pengawasan negara atas praktik keagamaan melalui kewajiban bagi pelajar SD, SMP, dan SMA di Kota Padang untuk mengikuti kegiatan Smart Surau, seperti salat subuh berjamaah, dengan kehadiran dipantau melalui pindai barcode. Sehingga, studi ini menunjukkan bahwa populisme Islam di tingkat lokal tidak hanya bekerja melalui retorika, tetapi juga melalui kebijakan dan instrumen tata kelola. Program Smart Surau memperlihatkan bagaimana simbolisme keagamaan, teknologi, dan regulasi bertemu untuk memperkuat legitimasi politik sekaligus membentuk ulang otoritas keagamaan. Artikel ini berkontribusi pada kajian populisme Islam, yaitu mobilisasi simbol dan seruan moral Islam yang menjadikan umat sebagai basis politik lintas kelas sekaligus bentuk politik yang rentan dikooptasi elite, dengan menunjukkan bagaimana populisme tersebut dilembagakan melalui regulasi keagamaan di tingkat lokal. Temuan ini memberi implikasi bagi pemahaman relasi antara agama, pemerintah daerah, dan kebijakan di Indonesia yang terdesentralisasi.

Kata kunci: populisme Islam; Regulasi; tata kelola agama; Smart Surau; politik local

Governing AI in Urban Waste Management: Adaptive Accountability and Institutional Learning in Semarang, Indonesia (2024-2026)

Ajeng Widya Prakasita

The growing adoption of artificial intelligence (AI) in urban governance has transformed how local governments monitor public services, manage information, and exercise institutional authority. However, technological innovation does not necessarily strengthen democratic accountability. This study examines the politics of AI governance in urban waste management by investigating how AI-based monitoring systems shape institutional authority, accountability mechanisms, and institutional learning. Focusing on Artificial Intelligence Solusi Sampah (AISSA), introduced by the Semarang City Government in 2024, the study explores how technological oversight, information control, and institutional responsibilities have evolved throughout its implementation from 2024 to 2026. This study employs a qualitative retrospective longitudinal case study with a contrasting-case approach. AISSA monitors 44 temporary waste collection sites (TPS) using AI-powered computer vision and CCTV. The study proposes purposive sampling of up to 10 sites, drawing on the 5 sites with the highest and the 5 with the lowest frequencies of AI-detected waste accumulation. Data collection will involve analysis of policy and regulatory documents, historical AI monitoring records, and in-depth interviews with local government officials, technology managers, sanitation workers, and civil society representatives. Process tracing will be employed to examine how AI-generated information shapes institutional responses, accountability practices, and procedural adjustments over time. As the research is ongoing, the study is expected to identify how AI-mediated monitoring influences the distribution of authority, institutional oversight, and accountability practices within urban waste governance. It will investigate whether variations in AI-generated monitoring outcomes correspond to differences in institutional responsiveness and whether technological feedback contributes to institutional learning and adjustments in governance procedures. The study will also examine the potential tension between accountability through AI, in which technology strengthens bureaucratic monitoring, and accountability of AI, in which technological systems themselves remain subject to transparency, scrutiny, and public oversight. This research is expected to contribute to political science scholarship by explaining how AI adoption may reshape power relations, institutional responsibilities, and democratic accountability in local governance. By integrating the politics of technology with adaptive accountability and institutional learning, the study seeks to identify the conditions under which AI-enabled governance can support institutional adaptation while maintaining transparency and public accountability.

Keywords: AI Governance; Politics of Technology; Adaptive Accountability; Institutional Learning; Urban Waste Management

Digital Colonialism and Muslim Political Agency: Rethinking Digital Sovereignty from the Global South

Asep Muhamad Iqbal

Digital platforms have become central infrastructures of political communication, yet their concentration of data ownership, algorithmic visibility, and monetization of attention raises questions about whose interests govern public life in the Global South. Drawing on Couldry and Mejias's concept of data colonialism, this proposed study examines how Indonesian Muslim civil society organizations negotiate dependence on transnational platforms while attempting to retain control over community data, public narratives, and political autonomy. It asks how unequal relations between global technology companies, the Indonesian state, and Muslim organizations shape opportunities for political agency, and whether digital sovereignty can be conceived beyond state control as a collective democratic capability. The study adopts a qualitative, comparative case-study design focused on Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and the Indonesian Ulema Council (MUI). These organizations are selected as contrasting institutional cases rather than representatives of all Indonesian Muslims. Evidence will be gathered through purposively selected organizational statements, publicly documented digital initiatives, platform governance policies, regulatory texts, and, where feasible, semi-structured interviews with organizational digital-strategy personnel and relevant policy actors. Indonesia's Personal Data Protection Law (Law No. 27 of 2022) and National Cybersecurity Strategy (Presidential Regulation No. 47 of 2023) will provide important, but distinct, policy reference points. Data will be analyzed using critical thematic and comparative policy analysis informed by data colonialism, platform political economy, and theories of political agency. The analysis will distinguish documented practices from organizational aspirations and assess four dimensions: platform dependence, data governance, attention-based visibility, and institutional capacity to challenge or redesign technological arrangements. The study is expected to identify different modes of negotiation, including accommodation of commercial platforms, development of organization-controlled digital infrastructures, and efforts to influence public debates on data and artificial intelligence. It will investigate whether such strategies enhance meaningful autonomy or reproduce new inequalities, centralized control, and dependence on commercial technologies. The study aims to extend data colonialism scholarship by specifying how religious civil society organizations act not only as sources of extractable data or platform users but also as political agents capable of negotiating, contesting, and partially reshaping digital power. It proposes a framework of civic digital sovereignty connecting collective data stewardship, accountability over platform governance, and democratic participation, while avoiding the assumption that national data localization alone guarantees self-determination. By examining organizational strategies and their limits in Indonesia, the research seeks to clarify the conditions under which Muslim political agency can strengthen inclusive digital sovereignty in the Global South. Its anticipated implication is that sovereignty should be evaluated not solely through state cybersecurity capacity or territorial control of data, but also through citizens' and civic organizations' effective ability to govern data, contest platform decisions, and participate in setting the rules of digital public life.

Keywords: Digital Colonialism; Muslim Political Agency; Digital Sovereignty; Platform Power; Global South

PANEL 4 - Gerakan Sosial dan Partisipasi Warga

Pengawasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (peti): Jaringan Kekuasaan dan Tantangan Akuntabilitas Negara di Sumatera Barat

Dewi Anggraini, Syaifuddin Islami

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sumatera Barat tetap bertahan meskipun penertiban, pengawasan, dan penegakan hukum telah berulang kali dilakukan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan mengapa pengawasan formal belum mampu memutus keberlanjutan PETI dengan menempatkan jaringan kekuasaan, shadow state, dan akuntabilitas negara sebagai fokus analisis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif di Kabupaten Sijunjung, Dharmasraya, dan Solok. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi dan dokumentasi. Analisis dilakukan melalui koding tematik, pemetaan aktor dan relasi, perbandingan lintas kasus, dan triangulasi dengan perspektif ekologi politik serta konsep shadow state. Temuan menunjukkan bahwa PETI bukan sekadar aktivitas penambang ilegal pada suatu lokasi, tetapi jaringan ekonomi-politik yang menghubungkan modal, alat dan bahan bakar, akses lahan, tenaga kerja, pengumpulan dan perdagangan emas, informasi, serta bentuk perlindungan informal. Penambang lapangan merupakan aktor yang paling mudah terlihat dan ditindak, sementara keberlanjutan operasi banyak ditentukan oleh aktor yang menguasai pembiayaan, sarana produksi, jalur distribusi, dan akses informasi. Pola pengawasan yang reaktif dan berorientasi pada lokasi tambang menyebabkan penegakan hukum mudah berhenti pada pekerja dan operasi lapangan tanpa memutus simpul hulu jaringan. Penetapan 121 blok Wilayah Pertambangan Rakyat seluas 5.697,85 hektare di delapan kabupaten membuka peluang formalisasi, tetapi juga menghadirkan risiko pemutihan struktur lama apabila izin tidak disertai pemeriksaan pemilik manfaat, sumber modal, rantai pasok, konflik kepentingan, kewajiban lingkungan, serta pengawasan multipihak. Akuntabilitas negara dalam penanganan PETI memerlukan perubahan objek dan politik pengawasan, yakni dari pendekatan berbasis lokasi menuju pengawasan berbasis jaringan. Negara perlu menautkan pengawasan WPR/IPR dengan keterlacakan modal, alat, BBM, rantai emas, pengendali manfaat, reklamasi, serta kontrol publik dan nagari. Temuan penelitian juga menegaskan bahwa kegagalan pengawasan PETI bukan semata persoalan kapasitas administratif, tetapi juga persoalan distribusi kekuasaan dan kemampuan institusi formal menembus tata kelola informal.

Kata kunci: Politik pengawasan; PETI; jaringan kekuasaan; shadow state; akuntabilitas negara

Satu Undang-Undang, Dua Rancangan: Otonomi Adat dan Relasi Kuasa pada Nagari dan Desa Adat Bali

Irawati, Dewi Anggraini, Tri Oktaviana

Artikel ini membandingkan dua model akomodasi kelembagaan desa adat di Indonesia pasca pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pertama, model peleburan (fusion) pada nagari di Sumatera Barat, yang mengintegrasikan lembaga adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) ke dalam satu kesatuan pemerintahan nigari. Kedua, model berdampingan (dualism) pada desa adat di Bali, yang mempertahankan pemisahan struktural antara desa adat (pakraman) dan desa dinas. Dengan menganalisis 68 karya ilmiah tentang nagari dan 69 karya ilmiah tentang desa adat Bali, serta membandingkan data lapangan peneliti di Sumatera Barat dan Bali. Artikel ini mengkaji bagaimana rancangan kelembagaan membentuk otonomi adat, relasi kuasa antara negara dan masyarakat adat, serta hasil bagi warga dalam hal partisipasi, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya komunal. Temuan menunjukkan bahwa model peleburan menawarkan kesatuan administratif namun berisiko mengakibatkan subordinasi adat oleh birokrasi negara dan marginalisasi lembaga adat KAN dalam proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, model berdampingan menghasilkan otonomi adat yang lebih kuat dan kapasitas resistensi terhadap intervensi negara yang lebih tinggi, meskipun berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara dua entitas kelembagaan. Kedua model mencerminkan trade-off fundamental antara integrasi kelembagaan dan preservasi otonomi adat. Artikel ini menyimpulkan perlunya eksibilitas kebijakan nasional yang lebih besar untuk mengakomodasi keragaman model akomodasi desa adat yang berkembang secara historis di berbagai daerah Indonesia.

Kata kunci: Desa adat; nagari; otonomi adat; desentralisasi; pluralisme hukum; pemerintahan lokal; Minangkabau; Bali

Citizenship and Uncertainty Regarding Spatial Rights: the Politics of Citizen Recognition in the Dupak Magersari Railway-adjacent Settlement, Surabaya

Galang Geraldy, Mandra Nur Alia, Rizca Yunike Putri

Recognition of an individual as a citizen does not in itself guarantee the certainty of rights and equal standing within the urban environment. This issue is evident in the settlements along the railway line in Dupak Magersari, Surabaya, where administrative recognition of residents coexists with legal uncertainty regarding the land on which they live. This article analyses the relationship between citizenship, the fulfilment of rights, and the regulation of urban space to understand how residents maintain their status as part of urban life amidst this uncertainty. The research employs a qualitative approach using a historical-critical case study design, based on in-depth interviews, field observations, and document analysis conducted between 2023 and 2025. The analysis draws on T. H. Marshall's thinking regarding the dimensions of citizenship and citizens' rights, as well as James Holston's perspective on inequalities in the realisation of citizenship within an urban context. The findings indicate that possession of an Identity Card (KTP), registration in a Family Card (KK), and Land and Building Tax (PBB) administration do not provide residents with certainty regarding land ownership. Meanwhile, the fulfilment of basic needs takes place amidst conflicting interests between the safeguarding of assets and railway operations on the one hand, and the sustainability of settlement life on the other. The issue of access to the Public Water Supply (PDAM) demonstrates that public services do not always automatically follow administrative recognition, but involve institutional processes and negotiation. These conditions reveal a gap between residents' administrative status, the fulfilment of basic needs, and the certainty of rights to space.

Keywords: citizenship; politics of recognition; the right to space; public services; informal settlements

Energy without Institutions: Structural Constraints on Opposition in Post-reformasi Indonesia

Andhik Beni Saputra, Andri Rusta

Indonesia's Gen Z is digitally active and attentive to civil liberties, and civil society uses social media extensively for mobilization and campaigns. Yet formal opposition remains weak, and criticism of government policy often meets repression. This article explains why durable democratic commitment, understood as organized and institutional action rather than episodic expression, remains thin. The study uses a qualitative, comparative case study design. Data are drawn entirely from secondary sources, particularly books, academic journal articles, and news reports and articles in the mass media. The analysis combines process tracing with thematic analysis across three sets of cases—the weak institutionalization of political parties, the fragmentation of civil society, and episodic student-led protests from 2024 onwards. The analysis rests on two complementary lenses. The structural lens examines organizational weakness in parties and civil society, while the political economy examines how elite control of resources shapes parties, media ownership, and online discourse. The study expects to find that parties depend on patronage and state resources for survival, which gives them little incentive to act as opposition, and that many civil society organizations depend on state projects, which fragments collective action and limits independent advocacy. It also expects to show that elite capture extends to the media and the digital sphere, where messages can be co-opted through ownership, paid influencers, and coordinated amplification, producing an uneven rather than free arena of contestation. Finally, it expects to show that protests succeed mainly when demands are narrow and elite factions have reasons to back down, which suggests that success depends on elite openings rather than institutional channels. The tentative conclusion is that Gen Z's digital activism is structurally orphaned, it has energy and a medium but no institutional home, because parties and civil society are tied to a resource system controlled by elites. Weak institutionalization is the underlying condition, and elite resource control is the mechanism that reproduces it. Democratic commitment therefore remains episodic and reactive rather than durable.

Keywords: opposition, Generation Z, civil society, social media, Indonesian democracy

Digital Citizenship and the Mechanisms of Contemporary Political Engagement: an Examination of the Bonatua Silalahi–Denny Indrayana Initiative for Public Institutional Responsibility

Hasan Mustapa, Mohamad Jaenudin, Muhammad Anwar Syi'arudin

The digital transformation has spawned new dynamics in political participation, shifting digital citizenship from passive online discourse to structured crowdsourced accountability and legal activism. This study examines the interaction among digital citizenship, emerging modes of political participation, and constitutional adjudication in Indonesia through a case study on Bonatua Silalahi's administrative degree verification, Denny Indrayana's public crowdsourcing initiative, and their subsequent legal challenge before the Constitutional Court (MK) regarding the vice-presidential candidacy qualifications of Gibran Rakabuming Raka. Employing a qualitative approach with an embedded case study design and critical discourse analysis, this research investigates how citizen political participation manifests through data crowdsourcing, incentive-driven public engagement, and the formalization of grievances in court. The findings reveal that fusing citizen-led investigation with digital legal activism successfully expanded the horizon of non-conventional political participation, reframing active acts of citizenship to demand public accountability. However, as this movement transitioned into the judicial sphere, the Constitutional Court's procedural requirements and standard of proof—resulting in an inadmissible verdict (Niet Ontvankelijk Verklaard)—exposed a structural tension between digital political participation dynamics and formal judicial boundaries. The study concludes that despite procedural legal limitations, the synergy between crowdsourced accountability and legal activism marks a pivotal shift in digital citizenship and participatory oversight within Indonesian democracy.

Keywords: Digital Citizenship, Political Participation, Crowdsourced Accountability, Legal Activism, Crowdsourcing, Constitutional Court

Keadilan Ekologis dalam Perspektif Politik Lingkungan: Studi Kasus over Capacity di Tpa Tamangapa Makassar

Andi G. A. Fawelau, M. A. Badri, I. N. Haerul, A. Alif, R. Analta, Muh R. W. H. Amir, Sakinah Nadir

Fenomena over capacity di TPA Tamangapa Kota Makassar memperlihatkan persoalan tata kelola lingkungan perkotaan yang semakin mengkhawatirkan. Meskipun berbagai regulasi pengelolaan sampah di tingkat nasional maupun daerah telah diterbitkan, tumpukan sampah yang terus menggunung serta ancaman pencemaran di sekitar TPA mengindikasikan adanya kesenjangan mendasar antara norma kebijakan dan realitas implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk membedah bagaimana dinamika kebijakan serta relasi kekuasaan dalam tata kelola lingkungan di Kota Makassar berkontribusi pada krisis kapasitas di TPA Tamangapa. Selain itu, kajian ini hendak mengevaluasi sejauh mana kebijakan pengelolaan tempat pemrosesan akhir tersebut telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan ekologis bagi warga yang terdampak. Kajian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data lapangan dihimpun melalui observasi langsung di area TPA Tamangapa serta wawancara mendalam bersama para pemangku kepentingan. Informan penelitian mencakup jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, pengelola UPTD TPA Tamangapa, aktivis WALHI Sulawesi Selatan, tokoh masyarakat, pekerja maupun pemulung, hingga warga permukiman di sekitar kawasan TPA. Peneliti juga melakukan penelusuran dokumen legal formal dan perencanaan teknis. Seluruh data dianalisis menggunakan Thematic Analysis yang dipadukan dengan kerangka pemikiran politik lingkungan John Dryzek, khususnya ragam wacana reformis-prosaik dan imajinatif, serta prinsip keadilan ekologis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tata kelola sampah di Kota Makassar masih didominasi oleh corak pendekatan teknokratis dan administratif. Kebijakan pemerintah cenderung bertumpu pada solusi fisik-teknis di hilir, seperti transisi menuju sanitary landfill dan rencana pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Namun dalam praktiknya, TPA Tamangapa masih beroperasi mendekati sistem open dumping akibat tingginya beban sampah harian dan minimnya pemilahan sejak dari sumber rumah tangga. Temuan ini memperlihatkan adanya pola distribusi beban ekologis yang timpang. Masyarakat kelas bawah di sekitar TPA menjadi kelompok yang paling banyak menanggung dampak buruk berupa polusi bau, risiko penyakit, dan potensi bencana lingkungan tanpa memperoleh jaminan perlindungan dan kompensasi yang adil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa persoalan over capacity di TPA Tamangapa bukanlah sekadar kegagalan teknisoperasional, melainkan representasi dari ketimpangan struktur politik lingkungan daerah. Pendekatan pengelolaan yang terlalu berorientasi pada teknologi di hilir tanpa menguatkan partisipasi warga dan keadilan prosedural di hulu terbukti gagal menyelesaikan akar krisis persampahan. Diperlukan pergeseran paradigma dalam tata kelola lingkungan Kota Makassar agar lebih berorientasi pada prinsip keadilan ekologis yang inklusif, transparan, serta mengakui hak-hak warga terdampak secara berkelanjutan.

Kata kunci: Over Capacity; TPA Tamangapa; Politik Lingkungan; John Dryzek; Keadilan Ekologis; Pengelolaan Sampah

PANEL 5 - Keamanan Siber, Privasi, dan Kedaulatan Digital

Political Rhetoric on Digital Sovereignty and Cybersecurity: Discursive Contestation over the Future of Indonesian Democracy

Iding Rosyidin

This study aims to analyze political rhetoric on digital sovereignty and cybersecurity in the discursive contestation over the future of Indonesian democracy during the 2024–2025 period. It focuses on how the government, state institutions, political actors, the media, and civil society frame cyber threats, personal data protection, disinformation, and freedom of expression in the digital sphere. Theoretically, this study draws on Aristotle's perspective on political rhetoric, particularly the concepts of ethos, pathos, and logos, combined with critical discourse analysis to uncover strategies of legitimation, threat construction, and power relations in digital discourse. The study adopts a qualitative approach and employs discourse analysis to examine relevant speeches, official statements, policy documents, media coverage, and social media content. The empirical data include the ransomware attack on the Temporary National Data Center in June 2024; reports from the Ministry of Communication and Informatics documenting 195 election-related hoax issues disseminated through 2,825 pieces of content during the period from July 1, 2023, to January 24, 2024; and the Freedom on the Net 2024 report, which assigned Indonesia a score of 49 out of 100 and classified it as Partly Free. The study also examines Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection and government statements concerning the strengthening of cybersecurity as an integral component of national defense. The preliminary findings identify three main arenas of discursive contestation. First, the national security narrative positions digital sovereignty as a strategic necessity for protecting infrastructure, data, and state stability. Second, the democratic integrity narrative emphasizes the threats posed by disinformation to electoral quality, public trust, and citizens' political participation. Third, the digital rights narrative highlights the importance of privacy, freedom of expression, transparency, and accountability in implementing security policies. These three arenas indicate tensions between strengthening digital security capabilities and protecting democratic rights. However, the patterns of rhetorical strategies and the dominance of particular discourses among different actors must be established through systematic coding and comparative data analysis. This study concludes that the future of Indonesian democracy depends on the state's ability to establish resilient yet democratic digital sovereignty through cybersecurity governance that is transparent, proportionate, accountable, and respectful of citizens' digital rights.

Keywords: Political Rhetoric; Digital Sovereignty; Cybersecurity; Critical Discourse Analysis; Digital Democracy; Digital Rights

Keamanan sebagai Konstruksi Kekuasaan: Reformasi POLRI dan Kebebasan Sipil dalam Demokrasi Indonesia

Muhammad Rafi Fadilah

Transisi demokrasi tidak hanya menuntut perubahan formal institusi keamanan, tetapi juga transformasi dalam cara kewenangan dan kebebasan sipil dipahami serta dipraktikkan. Di Indonesia, pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari angkatan bersenjata setelah Reformasi 1998 dan pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menandai perubahan kelembagaan penting. Namun, perubahan tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan ketegangan antara kewenangan kepolisian dan perlindungan kebebasan sipil. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi diskursif Polri pasca-Reformasi dan implikasinya terhadap relasi keamanan, kebebasan sipil, dan demokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis wacana kritis Norman Fairclough dan konsepsi tiga dimensi kekuasaan Steven Lukes. Data diperoleh dari analisis dokumen, teks media, dan tiga belas wawancara semi-terstruktur dengan pejabat kepolisian, purnawirawan Polri, akademisi, perwakilan lembaga negara, serta aktor masyarakat sipil. Analisis mencakup kerangka hukum, wacana pemolisian masyarakat dan jargon Polri, penanganan demonstrasi, serta kontestasi elektoral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi Polri menghasilkan perubahan formal dan kelembagaan tanpa sepenuhnya mentransformasikan fondasi diskursif dan praktik pemolisian. Keamanan masih dikonstruksikan melalui ketegangan antara pelayanan publik dan pemeliharaan ketertiban melalui kewenangan koersif. Dalam konstruksi tersebut, demonstrasi dan ekspresi perbedaan pendapat dapat dibingkai sebagai ancaman terhadap ketertiban umum, sehingga pembatasan kebebasan berpotensi memperoleh pembenaran melalui bahasa legalitas dan tuntutan keamanan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan praktik koersif tidak hanya berkaitan dengan kelemahan kelembagaan, tetapi juga dengan konstruksi kewenangan yang dianggap sah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi Polri merepresentasikan transformasi diskursif yang belum tuntas. Dengan menempatkan keamanan sebagai konstruksi kekuasaan, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan kebebasan sipil dan konsolidasi demokrasi mensyaratkan pembatasan kewenangan yang substantif, akuntabilitas, dan mendapat legitimasi public.

Kata kunci: pemolisian demokratis; kebebasan sipil; tata kelola keamanan; reformasi kepolisian

Bukan Sekadar Spill the Tea: Membongkar Krisis Perlindungan dan Akuntabilitas Hukum di TikTok

Revani Angelina Mirabel, Zhahra Renitania, Regzi Cholimatus Sherin

Perkembangan digital khususnya TiktTok memberikan ruang besar untuk mempengaruhi publik. Influencer memiliki basis dukungan dan pengaruh publik yang rentan disalahgunakan melalui konten manipulatif (AI), pencatutan wajah untuk iklan, dan pelaporan massal oleh buzzer, dengan dampak meluas ke pengguna umum. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk penyalahgunaan, kerugian, serta tanggung jawab hukum platform dan pemerintah. Teori pertanggungjawaban hukum digunakan untuk menentukan pihak yang menanggung akibat penyalahgunaan. UU ITE, UU PDP, dan aturan penyelenggara sistem elektronik menjadi dasar analisis, termasuk peran perizinan platform. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kasus platform TikTok. Bahan hukum, kebijakan platform, dan kasus terdokumentasi dianalisis secara kualitatif deskriptif. Temuan menunjukkan konten vulgar dapat lolos moderasi melalui penggunaan tagar tertentu, serta terindikasi adanya pelaporan akun terkoordinasi oleh buzzer. Dalam kasus pencatutan wajah oleh perusahaan, penyelesaian hanya terjadi antarpribadi tanpa pemulihan dari platform. Kesimpulannya, kebijakan platform sudah ada, tetapi celah moderasi dan ketiadaan jalur pemulihan korban membuat penyalahgunaan berlanjut, diperparah rendahnya literasi digital. Platform dan pemerintah perlu memperkuat perizinan, moderasi dan pemulihan korban, disertai dengan himbauan kepada masyarakat agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan platform digital. Penelitian ini menyarankan dilakukannya penelitian lebih lanjut untuk mengakomodasi berbagai kasus penyalahgunaan terhadap influencer.

Kata kunci: Influencer; Penyalahgunaan Platform Digital, Buzzer; Pertanggungjawaban Hukum; Perizinan Platform; TikTok

Kebijakan Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Siber

Sidratahta Mukhtar

Indonesia menghadapi ancaman siber dalam ditengah tingginya ancaman keamanan konvensional dan keamanan nirmiliter. Sementara itu, institusi keamanan baik TNI,Polri dan badan keamanan nasional tak mampu menghadapi dengan komprehensif karena regulasi politik belum tersedia dengan baik. Setiap negara besar seperti Indonesia perlu adanya UU/regulasi atau kebijakan politik yang kuat dalam upaya mengembangkan peran institusi keamanan itu. Badan Siber harus memiliki kapasitas yang besar dalam menghadapi disrupsi teknologi yang membawa ancaman siber dalam berbagai bentuknya. Sebagai dosen yang fokus dalam studi politik keamanan ingin mengkaji bagaimana strategi politik yang dilakukan untuk memperkuat kehadiran negara dalam sektor keamanan nasiona. Studi ini akan menggunakan kerangka Security dilema dari Buzan(1991),Hoffman ttg Hybrid wars dan Joseph Nye (2022) terkait syber anarchy dan definisi NATO tentang Hybrid threads. Dengen menggunakan metode kualitatif dan studi literatur, maka Indonesia belum memiliki kebijakan baru dalam menghadapi ancaman siber,maka perlu adanya kebijakan keamanan siber komprehensif kedepan.

Kata kunci: Strategi, ancaman siber, TNI, Polri dan Badan Sandi, regulasi keamanan siber

Potensi Penggunaan Pegasus Spyware sebagai Instrumen Pengawasan Digital untuk Kepentingan Politik: Studi atas Laporan Amnesty International

Husnul Isa Harahap

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan potensi penggunaan pegasus spyware sebagai instrumen pengawasan digital untuk kepentingan politik serta menganalisis implikasinya terhadap demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis laporan Amnesty International, khususnya laporan investigasi Pegasus Project dan laporan metodologi forensiknya, serta didukung oleh literatur terkait keamanan cyber dan pengawasan digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa pegasus spyware memiliki kemampuan untuk menyusupi perangkat komunikasi secara tersembunyi tanpa menunjukkan tanda-tanda yang mudah dikenali. Kemampuan tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk mengakses informasi sensitif serta mengawasi komunikasi dan aktivitas tokoh politik, jurnalis, aktivis, dan masyarakat. Dalam konteks politik, penyalahgunaan teknologi ini dapat mengancam privasi, membatasi kebebasan berekspresi, mengganggu kebebasan pers, dan membuka peluang penyalahgunaan informasi untuk kepentingan tertentu. Kasus-kasus penyalahgunaan pegasus spyware yang diungkap dalam laporan Amnesty International dapat menjadi bahan pembelajaran mengenai pentingnya mengantisipasi ancaman pengawasan digital yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pegasus spyware diklaim sebagai alat untuk mendukung penegakan hukum dan penyelidikan kejahatan, penggunaannya tetap memiliki risiko penyalahgunaan, terutama apabila tidak disertai transparansi, pengawasan yang memadai, dan mekanisme akuntabilitas yang jelas. Dalam kondisi tersebut, pegasus spyware berpotensi menjadi instrumen pengawasan politik yang mengancam privasi, kebebasan, dan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, mekanisme pengawasan independen, transparansi, dan perlindungan data pribadi untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan teknologi pengawasan digital.

Kata kunci: pegasus spyware, ancaman cyber, politik, demokrasi, pengawasan digital

PANEL 6 - Literasi Politik dan Perlindungan di Era Digital

Pendidikan Politik di Era Digital: Membangun Partisipasi Anak Muda Melalui Literasi Informasi yang Kritis di Kota Palangka Raya

Alfrid Sentosa, Kur Junaidi, Betty Karya

This study intends to analyse the function of critical information literacy in enhancing political education and youth political involvement in the digital era, especially among young people in Palangka Raya. The study investigates the obstacles young people have in assessing the reliability of political material, identifying disinformation, and applying critical information literacy to their political engagement. This research used a qualitative method using a case study design. Participants were young people aged 15–30 years who lived in Palangka Raya, actively used social media, and had experience in engaging in political activities (directly or through digital media). Data was acquired through in-depth interviews, focus group discussions (FGDs) and examination of pertinent documents including news stories, social media content and reports of youth organisations. The data were analysed thematically, through the processes of transcribing, initial coding, identifying themes and verifying the findings. The results show that young people in Palangka Raya have different level of awareness of the important information literacy and political involvement. Social media is thought to be a key source of political information and a place for political conversation, but the mass dissemination of false and misleading information is a major problem. Many participants struggled to differentiate between credible and unreliable sources, and stated that they do not always check political material before to distributing it. Young people have reasonably strong access to political information, but only a tiny minority actively applies critical information literacy in political discussions or actions. The findings suggest the necessity for an integrated approach to political education, critical information literacy and digital political participation. The study concludes that the integration of critical information literacy in digital political education is vital to improve the quality of youth political involvement. Such an approach aims to enhance the capacity of young people to critically analyse political information and to foster their development as more responsible consumers and creators of information. Furthermore, the findings provide practical implications for educators and policymakers to design political education programmes that are sensitive to the digital environment and the requirements of young people in Palangka Raya.

Keywords: political education; critical information literacy; youth political participation; social media; Palangka Raya

Kolaborasi Perlindungan Anak dalam Perspektif Politik Kesejahteraan: Studi Kasus Program KoGuRuPa di Surabaya

Rizca Yunike Putri, Sri Musrifah

Perlindungan anak merupakan bagian penting dari politik kesejahteraan yang mencerminkan tanggung jawab negara dan aktor nonnegara dalam menjamin pemenuhan hak, keselamatan, dan kesejahteraan anak. Perlindungan anak merupakan bagian integral dari agenda kesejahteraan sosial yang mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak dan keselamatan anak. Di Indonesia, penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022, yang menekankan pembangunan sistematis, terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak serta memberikan perlindungan khusus. Di tingkat lokal, Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan program Kelurahan Ramah Anak sebagai salah satu instrumen implementasi kebijakan perlindungan anak yang berlandaskan, antara lain, pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam implementasinya, lembaga pendidikan memiliki posisi strategis dalam memberikan edukasi, sosialisasi, pengawasan, dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem perlindungan anak yang melibatkan tenaga pendidik, orang tua, pengasuh, dan masyarakat. Namun, pencegahan kekerasan terhadap anak membutuhkan koordinasi antara lembaga pendidikan, keluarga, pengasuh, dan pemerintah. Penelitian ini bertujuan menganalisis Program Kolaborasi Guru, Orang Tua, dan Pengasuh (KoGuRuPa), sebuah program pengabdian kepada masyarakat yang telah diterapkan sejak 2025, untuk memahami bagaimana praktik kolaboratif mendukung perlindungan anak dan bagaimana tanggung jawab perlindungan tersebut didistribusikan di antara para aktor dalam perspektif politik kesejahteraan. Menggunakan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA). Metode ini digunakan agar masyarakat sebagai mitra sasaran mampu terlibat aktif sebagai perencana, peneliti dan pelaksana dengan melibatkan guru, orang tua, pengasuh, dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam pelaksanaan KoGuRuPa. Berdasarkan temuan menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi pada anak tidak hanya perilaku perundungan yang dilakukan oleh teman sebayanya, namun juga pihak sekolah, pengasuh, keluarga bahkan kerabat. Perspektif politik kesejahteraan digunakan untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab perlindungan anak didistribusikan di antara negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat, serta bagaimana hubungan antar aktor tersebut berkontribusi terhadap pemenuhan hak dan keselamatan anak. Melalui perspektif ini, KoGuRuPa ditempatkan tidak semata-mata sebagai program edukasi dan pencegahan kekerasan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola kesejahteraan anak yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Penelitian ini berkontribusi pada kajian politik kesejahteraan dengan menempatkan perlindungan anak sebagai tanggung jawab tata kelola bersama yang melibatkan negara, lembaga pendidikan, keluarga, dan aktor masyarakat. Kajian terhadap KoGuRuPa dapat memperjelas peluang dan keterbatasan pendekatan kolaboratif dalam memperkuat perlindungan anak di tingkat lokal. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan dan praktik perlindungan anak yang lebih terkoordinasi, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: kebijakan publik lokal, KoGuRuPa, perlindungan anak, politik kesejahteraan, tata kelola kolaboratif

Dilema Algoritma dan Aktivisme Digital: Studi Netnografi pada Literasi Politik dan Perlindungan Anak di Instagram

Gian Sapta Ginanjar

Era digital telah memfasilitasi transformasi demokrasi, di mana media sosial menjadi ruang alternatif yang sangat krusial bagi partisipasi politik generasi muda dan kelompok marginal. Melalui platform seperti Instagram, fenomena aktivisme digital yang direpresentasikan oleh jargon "tidak viral maka tidak didengar" telah menjadi instrumen utama dalam menyampaikan aspirasi, kritik, serta menuntut akuntabilitas negara. Namun, keterlibatan kelompok rentan, khususnya anak dan remaja, dalam arus aktivisme digital ini memunculkan urgensi baru terkait literasi politik dan perlindungan anak di era digital. Praktik partisipasi ini tidak hanya menghadapi kebuntuan birokrasi, tetapi juga rentan terhadap manipulasi informasi, polarisasi, dan eksploitasi algoritma yang mengancam keamanan anak di ruang siber. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merumuskan strategi partisipasi politik digital yang aman, inklusif, dan memiliki daya tahan (sustainabilitas) di dalam ekosistem algoritma Instagram. Secara spesifik, studi ini berupaya menciptakan formulasi gerakan viral yang memperkuat literasi politik publik, berfungsi sebagai katalisator kesadaran kritis, sekaligus membangun sistem perlindungan bagi partisipasi anak dari sensasi algoritma yang destruktif. Penelitian kualitatif ini mengintegrasikan dua kerangka metodologis. Pertama, pendekatan netnografi digunakan untuk memetakan pola perilaku, interaksi siber, dan dinamika jaringan gerakan politik inklusif yang melibatkan generasi muda. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatoris terhadap akun figur publik marginal, pengumpulan artefak visual kampanye politik, serta wawancara mendalam. Kedua, Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough diaplikasikan untuk membedah tiga dimensi utama, yakni analisis teks pada caption dan slogan, praktik diskursif yang menghubungkan narasi perlindungan anak dengan logika algoritma Instagram, serta praktik sosiokultural yang melihat dampaknya terhadap advokasi kebijakan di ruang nyata. Hasil penelitian berproyeksi memberikan kontribusi teoretis pada literatur tata kelola informasi digital, literasi kewarganegaraan, dan partisipasi politik digital. Dengan demikian, studi ini berkontribusi merumuskan kerangka strategis terkait rancangan visual dan retorika teks yang tidak hanya efektif menggugah political will pemerintah, tetapi juga menjamin perlindungan anak dalam berekspresi di ruang digital secara aman dan bermakna.

Kata kunci: Partisipasi Politik, Literasi Politik, Perlindungan Anak, Algoritma Instagram, Netnografi, Analisis Wacana Kritis

Dari Konten ke Jalanan: Glorifikasi Kekerasan di Media Sosial dan Permainan Daring Serta Kerentanan Remaja Jabodetabek terhadap Tawuran dan Narasi Radikal

Indah Novitasari, Fransiskus X. Gian Tue Mali

Fenomena tawuran remaja di Jabodetabek menunjukkan keterkaitan yang semakin erat antara aktivitas di ruang digital dan perilaku remaja. Saat ini, banyak akun media sosial kelompok pemuda dimanfaatkan secara terbuka sebagai sarana ajakan, provokasi berupa siaran langsung terjadinya konflik terbuka, bahkan sebagian di antaranya memperjualbelikan merchandise sebagai simbol loyalitas kelompok tawuran. Polda Metro Jaya mencatat 440 kasus tawuran di Jakarta sepanjang 2025. Pada periode yang sama, BNPT melaporkan terdapat sekitar 112 anak terpapar paham radikal melalui media sosial dan permainan daring, selain itu Densus 88 juga mengidentifikasi 70 anak sebagai anggota komunitas daring True Crime Community. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme glorifikasi kekerasan di media sosial dan permainan daring, mengidentifikasi titik temu antara pola mobilisasi tawuran dan radikalisasi daring, serta mengkaji respons kebijakan negara terhadap persoalan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan data sekunder. Data diperoleh melalui systematic literature review terhadap publikasi tahun 2021–2026, analisis isi pemberitaan dan pernyataan resmi aparat periode 2024–2026, serta analisis sejumlah regulasi terkait yang kemudian dianalisis secara tematik. Kebaruan riset ditekankan pada keterkaitan antara kekerasan yang timbul di kalangan remaja dengan indikasi radikalisme yang banyak berkembang pada media online. Hasil sementara menunjukkan bahwa media sosial berperan dalam keseluruhan siklus kekerasan, mulai dari koordinasi hingga monetisasi. Keterlibatan remaja dalam tawuran maupun jaringan radikal dilatarbelakangi motif yang serupa, yaitu kebutuhan akan pengakuan dan rasa memiliki terhadap kelompok. Respons Negara melalui kebijakan masih berorientasi pada pendekatan keamanan dan regulasi platform, sedangkan penguatan literasi digital bagi remaja belum mendapat perhatian memadai. Penelitian ini mengkaji bahwa diperlukan adanya pergeseran kebijakan perlindungan anak di ruang digital dari pendekatan sekuritisasi menuju pendekatan berbasis hak yang memperkuat kapasitas remaja sebagai warga negara.

Kata kunci: Media sosial dan glorifikasi kekerasan; tawuran remaja; radikalisasi daring; literasi digital; perlindungan anak

Kedaulatan Sinyal di Perbatasan: Studi Pendidikan Politik di Era Digital pada Masyarakat Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Yeftha Yerianto Sabaat, Frans B.R. Humau

Pendidikan politik di era digital diasumsikan berjalan melalui ruang digital yang dikuasai negara. Asumsi ini gugur di Oepoli. Oepoli, Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang merupakan beranda terdepan NKRI. Daerah ini berbatasan langsung dengan Distrik Oecusse, Timor Leste. Di wilayah dengan sengketa batas seluas 1.069 hektare yang belum tuntas sampai hari ini (Segmen Naktuka), dengan populasi kurang lebih 2.000 jiwa dan jarak tempuh 8-9 jam dari Kota Kupang, kedaulatan tidak hanya ditentukan oleh patok batas fisik, melainkan oleh kekuatan sinyal telekomunikasi yang disediakan oleh negara. Hingga 14 November 2020, Oepoli adalah blank spot operator Indonesia. Masyarakat hanya bisa mengakses internet melalui Telemor, operator seluler Timor Leste. Masyarakat harus membeli pulsa dalam mata uang Dollar AS atau menggunakan paket Telemor untuk mengikuti perkembangan, mengakses informasi pemerintahan, dan berkomunikasi. Kondisi ini menciptakan anomali kedaulatan: secara yuridis warga negara Indonesia (WNI), secara digital warga negara Timor Leste. Ketika negara melalui Telkomsel akhirnya membangun Base Transceiver Station (BTS) 4G LTE pada November 2020, persoalan tidak selesai. Di dusun Naktuka dan titik-titik batas terluar, sinyal Telemor tetap lebih kuat dan stabil dibandingkan sinyal Telkomsel yang sering hilang di Lembah bahkan di area padat penduduk. Masyarakat dihadapkan pada pilihan pragmatis dan politis setiap hari: menggunakan sinyal Indonesia yang lemah demi nasionalisme, atau menggunakan sinyal Timor Leste yang kencang demi keberlangsungan hidup dan pendidikan. Fenomena ini penulis sebut sebagai krisis kedaulatan sinyal. Tujuan: Penelitian ini ingin menganalisis bagaimana krisis kedaulatan sinyal yang berimplikasi pada praktik pendidikan politik di era digital bagi masyarakat perbatasan. Secara spesifik, penelitian ini ingin menjawab tiga pertanyaan mendasar: 1) Bagaimana kontestasi kedaulatan sinyal antara Telkomsel (Indonesia) dan Telemor (Timor Leste) terjadi di ruang publik (Masyarakat Oepoli). 2) Bagaimana masyarakat Oepoli memaknai pendidikan politik dan kewarganegaraan ketika infrastruktur digital yang mereka gunakan adalah milik negara lain? 3) Model pendidikan politik digital seperti apa yang relevan untuk wilayah perbatasan dengan kedaulatan sinyal yang terbelah? Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi digital perbatasan (digital borderland ethnography) di dua titik utama: Oepoli (pusat desa) dan Naktuka (zona bebas/sengketa). Teknik pengumpulan data meliputi: 1) Observasi partisipatif terhadap praktik penggunaan gawai dan pemilihan operator (Telemor vs Telkomsel) oleh Masyarakat Oepoli dalam hal ini anak sekolah dan orang tua, pemerintah desa, Danpos Satgas Pamtas RI-RDTL, tokoh agama dan tokoh adat setempat. 2) metode lainnya yaitu analisis konten digital pada Grup WhatsApp warga Oepoli dan konten llainnya pada platform digital yang dikonsumsi anak muda perbatasan; 3) Studi dokumen terkait kebijakan Palapa Ring dan pemerataan 4G Kominfo. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan coding tematik: sinyal, kedaulatan, identitas, dan pendidikan politik. Temuan awal menunjukkan tiga pola utama. Pertama, Kontestasi Sinyal sebagai kontestasi kedaulatan. Masyarakat Oepoli secara sadar melakukan signal switching - menggunakan dua HP atau dengan menggunakan dua SIM berbeda. HP pertama dengan Telkomsel untuk urusan resmi dengan pemerintah Indonesia (mengakses PIP/KIP, bantuan sosial), HP kedua dengan Telemor untuk urusan sehari-hari, pendidikan, dan komunikasi dengan kerabat di Oecusse. Kedua, Krisis Pendidikan Politik Digital. Pendidikan politik yang diajarkan di sekolah (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika) kalah bersaing dengan algoritma TikTok dan Facebook yang disuplai melalui sinyal Telemor yang menyajikan konten berbahasa Tetun dan Portugis tentang Timor Leste. Anak-anak Oepoli lebih mengenal Xanana Gusmao dan Ramos-Horta

daripada tokoh nasional Indonesia, karena algoritma mereka dibentuk oleh infrastruktur Timor Leste. Mereka menjadi liminal citizens - secara fisik di Indonesia, secara digital dibentuk oleh Timor Leste. Ketiga, Negara absen, sinyal tetangga hadir. Ketika negara absen secara sinyal, peran negara digantikan oleh instrument keagamaan dan instrument tradisional (Gereja, tokoh adat). Tokoh agama dan tokoh adat menjadi sumber informasi paling dipercaya. Kesimpulan dan Implikasi dari penelitian ini menekankan bahwa di perbatasan Oepoli-Oecusse, pendidikan politik di era digital tidak akan berhasil tanpa terlebih dahulu menegakkan kedaulatan sinyal. Konsep kedaulatan tidak lagi hanya tentang patok tapal batas dan pos penjagaan petugas keamanan, tetapi tentang siapa yang menguasai infrastruktur digital di ruang hidup warga. Penelitian ini menawarkan konsep baru kedaulatan sinyal sebagai prasyarat state presence di perbatasan dan merekomendasikan model Borderland Digital Citizenship Education-pendidikan kewarganegaraan yang mengakui realitas ganda sinyal dan identitas di perbatasan, bukan memaksakan narasi nasionalisme tunggal yang tidak didukung infrastruktur. Tanpa kedaulatan sinyal, Oepoli akan tetap menjadi wilayah yang secara de facto lebih terhubung ke Oecusse daripada ke Kupang (Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur).

Kata Kunci: Kedaulatan Sinyal, Pendidikan Politik, Era Digital, Perbatasan Indonesia-Timor Leste

PANEL 7 - Transformasi Pemerintahan dan Kebijakan Publik

Melampaui Kesepakatan Antarlembaga: Tata Kelola Informal dan Kesenjangan Implementasi dalam Kebijakan Transportasi Perkotaan yang Terfragmentasi

Qurnia Indah Permata Sari, Abdul Aziz, Ahmad Sukron

Transportasi perkotaan umumnya diatur oleh banyak lembaga sekaligus, sehingga forum koordinasi antarlembaga menjadi penting. Namun, kesepakatan di dalam forum tidak otomatis membuat kebijakan dijalankan dengan cara yang sama di lapangan. Penelitian ini mengkaji kebijakan wajib masuk terminal bagi bus di Terminal Arjosari, Kota Malang, yang dikelola bersama oleh Kementerian Perhubungan (melalui BPTD) dan Dinas Perhubungan Kota Malang. Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana aktor lapangan memaknai dan menegosiasikan kebijakan tersebut? Kedua, mengapa forum antarlembaga yang berhasil secara prosedural justru menghasilkan kepatuhan yang tidak merata? Ketiga, mekanisme apa yang menjembatani kesepakatan formal dengan pelaksanaan di lapangan? Analisis menggunakan kerangka Institutional Collective Action (ICA). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal. Penelitian lapangan dilakukan dalam dua tahap, yaitu Juni–Agustus 2025 dan Januari–Juni 2026. Sebanyak 14 informan dipilih secara purposif, terdiri atas pengelola terminal, aparat penegak aturan, operator transportasi, sopir angkot, pengemudi ojek daring dan ojek pangkalan, pedagang, juru parkir, pemanggil penumpang, serta penumpang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, termasuk notulen rapat koordinasi. Data dianalisis dengan analisis tematik enam tahap (Braun & Clarke) berbantuan NVivo 14. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi, pengodean terpisah oleh tiga peneliti, member checking, dan jejak audit. Hasilnya, satu kebijakan ternyata dijalankan dalam beberapa “versi” di lapangan. Aktor yang diuntungkan, seperti pengemudi ojek daring yang pesanannya naik sekitar 30 persen, cenderung patuh secara sukarela. Sebaliknya, sopir angkot yang tetap menanggung setoran harian sementara penumpangnya berkurang memilih menyesuaikan diri lewat praktik sehari-hari, misalnya menunggu penumpang di titik lama di luar terminal. Kepatuhan paling kuat saat petugas hadir dan melemah ketika pengawasan berkurang. Artinya, kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh aturan dan pengawasan, tetapi juga oleh siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Paguyuban transportasi, pemanggil penumpang, negosiasi lapangan, dan kesepakatan Pos Biru berperan sebagai “jembatan informal” yang menerjemahkan keputusan formal ke dalam rutinitas kerja sekaligus menekan biaya penegakan aturan. Penelitian ini juga merumuskan siklus tata kelola forum–lapangan yang adaptif, yang terdiri atas penyiapan prasyarat layanan, pengawasan berlapis (formal dan informal), evaluasi berkala, serta jalur penyesuaian bagi aktor yang terdampak. Dengan demikian, forum antarlembaga diperlukan, tetapi tidak cukup untuk menjamin kepatuhan di lapangan. Secara teoretis, artikel ini memperluas kerangka ICA dari tahap pembentukan kesepakatan ke tahap implementasi, yakni forum dapat menyelesaikan masalah koordinasi antarlembaga pemerintah, tetapi justru memunculkan masalah aksi kolektif baru di antara aktor lapangan. Secara praktis, penegakan aturan yang lebih ketat tidak dapat menggantikan desain kebijakan yang memang dapat dijalankan. Kepatuhan yang bertahan lama membutuhkan fasilitas transportasi yang terintegrasi, akses penumpang yang seimbang, keterwakilan kelompok terdampak, serta umpan balik yang rutin antara forum dan praktik lapangan.

Kata kunci: aktor lapangan; tata kelola informal; aksi kolektif institusional; implementasi kebijakan; tata kelola terminal

Politik Pembuatan Klaim: Negosiasi Kelas Menengah dan Praktik Kewargaan dalam Tata Kelola Kota di Indonesia

Haryanto

Kota-kota di Indonesia pascadesentralisasi ditandai oleh dominasi pengembang swasta yang memprivatisasi ruang serta rezim birokrasi lokal yang kerap beroperasi secara klientelistik dalam penyediaan utilitas perumahan. Kondisi struktural ini menciptakan kerentanan perkotaan yang menempatkan warga di antara inefisiensi negara dan komersialisasi barang publik. Sementara literatur utama mengenai kewargaan kota cenderung berfokus pada aktivisme kelompok marginal atau memosisikan kelas menengah di kawasan perumahan sekadar sebagai konsumen pasif yang terdepolitisasi. Penelitian ini berangkat dari permasalahan bahwa kelas menengah sebenarnya aktif melakukan negosiasi di arena triadik (warga, negara, dan pasar). Penelitian ini bertujuan mempelajari bagaimana warga kelas menengah kota menegosiasikan dan memformulasikan strategi pembuatan klaim atas utilitas dasar guna merebut hak atas kota. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus komparatif di Kota Makassar dan Semarang, penelitian ini mengoperasionalkan penalaran retroduktif berbasis ontologi realisme kritis untuk melacak mekanisme kausal pada tiga dimensi utama, yakni struktur sosial, agensi warga, dan interaksi relasional. Pengumpulan data melibatkan observasi partisipan dan wawancara mendalam terhadap warga perumahan, elite politik, birokrat, dan pengembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih-alih bersikap apatis, kelas menengah secara refleksif merespons kerentanannya melalui praktik “kewargaan generatif”, yakni sebuah artikulasi pembuatan klaim yang taktis, hibrida, dan adaptif. Praktik ini bermanifestasi ke dalam tiga tipologi strategi utama. Pertama, strategi berbasis patronase melalui lobi perantara politik. Kedua, strategi berbasis pasar melalui boikot dan protes komunal terhadap wanprestasi pengembang. Ketiga, strategi berbasis komunitas berupa swakelola infrastruktur mandiri. Interaksi relasional ini secara dialektis dapat mereproduksi hegemoni pasar dan klientelisme birokrasi, namun pada saat yang sama mampu mendorong dekomodifikasi ruang dan akuntabilitas di ruang privat. Penelitian ini berkontribusi pada kajian politik perkotaan kontemporer dengan menawarkan kerangka kewargaan yang mereposisi kelas menengah sebagai agen politik yang aktif. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa dalam konteks demokrasi lokal pascadesentralisasi, hak atas kota bukanlah jaminan konstitusional yang statis, melainkan kedaulatan ruang yang harus terus diproduksi dan dinegosiasikan di tengah arus neoliberalisasi dan rezim lokal yang klientelistik.

Kata kunci: politik perkotaan, kelas menengah, pembuatan klaim, kewargaan, tata kelola kota

Kepemimpinan Kolaboratif dan Political Entrepreneurship dalam Tata Kelola Koperasi Desa: Studi Kasus KMP Karangagung sebagai Model Pelayanan Publik Berbasis Komunitas

Ratna Ani Lestari, Mangihut Siregar, S. Agus Santosa

This paper examines the effectiveness of village cooperatives as instruments of public service and community-based economic empowerment. The Merah Putih Cooperative (KMP) in Karangagung Village is presented as a case study because it demonstrates collaborative leadership, social capital mobilization, political entrepreneurship, and institutional resilience—dimensions that are highly relevant to public administration and governance scholarship. The research aims to analyze how village leadership integrates cooperative governance with the principles of community-based public service, positioning the cooperative not only as an economic institution but also as a platform for participation, solidarity, and citizen empowerment. The study employs a single-case design with data collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. Qualitative thematic analysis was applied to identify patterns of collaborative leadership, trust-building, and adaptive institutional capacity. Findings reveal that the success of KMP Karangagung is not determined solely by financial support but by local leadership that consolidates community trust, builds cross-sector partnerships, and sustains institutional resilience. The cooperative's financial growth, diversified business activities, and adaptive mechanisms in facing risks illustrate its role as a community-based public service institution. This study concludes that KMP Karangagung represents a replicable model of collaborative governance in rural settings. Policy implications highlight the need to strengthen village leadership capacity as policy entrepreneurs, supported by cross-sectoral networks and deliberative mechanisms, to expand public service access and promote sustainable welfare.

Keywords: Public Service; Village Cooperative; Collaborative Governance; Social Capital; Political Entrepreneurship; Institutional Resilience

Trend and Gaps dalam Kebijakan Penanggulangan Banjir di Kota Palembang: Analisis Sistematic Literature Review

Siti Anisyah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren penelitian, kebijakan pemerintah, serta berbagai permasalahan dalam penanggulangan banjir di Kota Palembang melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Data penelitian diperoleh dari basis data Google Scholar dan IOPscience dengan rentang publikasi tahun 2020–2026 menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan banjir, tata kelola lingkungan, dan kebijakan publik di Kota Palembang. Dari hasil pencarian awal sebanyak 4.731 artikel, diperoleh 50 artikel yang memenuhi kriteria inklusi berdasarkan relevansi topik, kualitas publikasi, dan fokus kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banjir di Kota Palembang dipengaruhi oleh urbanisasi yang tidak terkendali, alih fungsi rawa dan ruang terbuka hijau, lemahnya sistem drainase, sedimentasi sungai, serta peningkatan curah hujan akibat perubahan iklim. Pemerintah Kota Palembang telah melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan kolam retensi, normalisasi sungai, penguatan sistem pompa, penerapan kebijakan Zero Delta Q, dan pengembangan sistem pengendalian banjir berbasis infrastruktur. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya koordinasi kelembagaan, rendahnya penegakan tata ruang, keterbatasan kapasitas infrastruktur, serta minimnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan tata kelola banjir yang adaptif, kolaboratif, berbasis lingkungan, dan didukung penguatan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palembang dalam mitigasi bencana perkotaan.

Kata kunci: Banjir Kota Palembang; Kebijakan Publik; Tata Kelola Banjir; Mitigasi Bencana; Systematic Literature Review

Who Governs the Road? Ambulance Escorts and State Capacity in Indonesia, Japan, South Korea, Thailand, and India

Ali Muhyidin, Julian A. Pasha, Ardila Putri, Silvia Dian Anggraeni, Muhammad Imam

Why do informal ambulance escorts emerge despite formal traffic laws granting ambulances priority on public roads? This article examines variation in emergency mobility governance across Indonesia, Japan, South Korea, Thailand, and India through the lenses of state capacity, informal institutions, and social trust. While ambulances in Japan and South Korea generally rely on legal authority and public compliance, those in Indonesia, and to varying extents Thailand and India, may depend on volunteer escorts or other informal actors to secure passage through congested traffic. The article argues that ambulance escorts function as informal governance mechanisms that compensate for limitations in state capacity and uneven compliance with traffic regulations. Using a comparative qualitative approach based on legal documents, policy reports, and secondary sources, the study examines how different combinations of institutional effectiveness and social trust shape emergency mobility practices across the five countries. The findings contribute to debates on everyday governance by showing how public roads become sites where formal and informal authority interact.

Keywords: Ambulance Escorts, State Capacity, Informal Institutions, Emergency Mobility Governance

PANEL 8 - Gender, Inklusi, dan Keadilan Sosial

Gendered Digital Justice: Ai-enabled Political Abuse and the Limits of Women's Political Inclusion in Indonesia

Mashita Dewi Tidore

Artificial intelligence is changing the ways political messages are produced and circulated, creating new vulnerabilities for women who participate in public life. In Indonesia, where social media plays an increasingly important role in political communication, AI-generated content can be used to discredit women politicians and undermine their public legitimacy. Such abuse raises a broader political question: can women be considered meaningfully included in democratic processes when participation in digital spaces exposes them to gender-specific forms of attack? This study examines how AI-enabled political abuse may limit women's political inclusion in Indonesia and explores what this challenge reveals about the relationship between digital governance and gender justice. This research adopts a qualitative approach through a critical literature review. Academic publications from 2016 to 2026 will be examined alongside earlier theoretical works where relevant. Literature will be retrieved from Scopus, Google Scholar, and Garuda using search terms related to AI-enabled political abuse, violence against women in politics, and digital political participation. The review will also draw on Indonesian policy documents and reports from credible institutions, including UN Women and Komnas Perempuan. Selected sources will be analysed thematically to understand how existing scholarship explains the political consequences of AI-enabled abuse and evaluates the adequacy of institutional responses. The review is expected to show that access to digital platforms does not necessarily translate into equal opportunities for political participation. When women face targeted attacks that damage their credibility or expose them to public humiliation, the costs of political visibility may become disproportionately high. The study will examine whether existing approaches to digital governance adequately account for these gendered consequences or whether the emphasis on technological security and content regulation leaves important dimensions of political inequality insufficiently addressed. This study positions gendered digital justice as an important consideration in assessing the quality of democratic inclusion. It argues that the ability to participate in digital political spaces without facing gender-based intimidation should be treated as part of substantive political equality, rather than merely a technical concern. By bringing debates on artificial intelligence into dialogue with feminist political analysis, the research seeks to develop a more gender-responsive understanding of digital governance in Indonesia.

Keywords: Gendered Digital Justice; Artificial Intelligence; Political Abuse; Women's Political Inclusion; Indonesia

Budaya Patriarki, Relasi Kuasa, dan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Kabupaten Nias

Lis Hayanti Warasi, Ainissifa, Yolanda Tambunan

Budaya patriarki merupakan salah satu faktor yang memengaruhi konstruksi peran gender, relasi kekuasaan, dan kesempatan perempuan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Nias, norma sosial dan budaya berperan dalam membentuk kedudukan serta keterlibatan perempuan dalam kehidupan sosial. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas ketidakadilan gender, asertivitas perempuan, dan dominasi budaya patriarki di Nias (Yurulina, 2019, Wigunawati 2018, dan Gulo dkk, 2024). Namun, hubungan antara norma patriarki, distribusi kekuasaan, dan akses perempuan terhadap pengambilan keputusan masih memerlukan kajian lebih lanjut dalam perspektif Ilmu Politik. Kesenjangan penelitian ini terletak pada perlunya analisis yang menghubungkan budaya patriarki dengan relasi kekuasaan, partisipasi perempuan, dan keadilan sosial secara terpadu, khususnya dalam konteks kehidupan keluarga dan masyarakat di Kabupaten Nias. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana norma patriarki berkaitan dengan pembagian peran, posisi tawar, kesempatan menyampaikan pendapat, serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui penelaahan literatur ilmiah dan dokumen penelitian terdahulu yang membahas budaya patriarki, relasi gender, dan kedudukan perempuan dalam masyarakat Nias. Data sekunder dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan perspektif politik gender, relasi kekuasaan, dan keadilan sosial. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi bagaimana norma sosial dan praktik budaya dapat membentuk distribusi kewenangan, akses terhadap sumber daya, serta kesempatan perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Karena penelitian masih berlangsung, kajian ini mengajukan argumentasi awal bahwa ketimpangan gender tidak hanya berkaitan dengan pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga berpotensi mencerminkan ketimpangan dalam distribusi kekuasaan, pengakuan sosial, dan akses terhadap proses pengambilan keputusan. Norma patriarki dapat memengaruhi posisi tawar perempuan, meskipun bentuk dan tingkat pengaruhnya perlu ditelaah berdasarkan bukti dalam literatur dan konteks sosial masyarakat setempat. Kebaruan penelitian terletak pada pengintegrasian perspektif politik gender, relasi kekuasaan, dan keadilan sosial untuk menganalisis bagaimana norma patriarki berkaitan dengan kesempatan perempuan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada tingkat keluarga dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan kajian politik gender dengan memperluas pemahaman mengenai hubungan antara norma budaya, distribusi kekuasaan, dan partisipasi perempuan. Hasil kajian juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi pemberdayaan perempuan yang lebih setara dan responsif terhadap konteks sosial budaya masyarakat Kabupaten Nias.

Kata kunci: budaya patriarki; relasi kekuasaan; partisipasi perempuan; pengambilan keputusan; keadilan sosial

Class and Articulation: Contestation and Agency of Women Workers in Balinese Patriarchal Structures

Bandiyah, Kadek Dwita Apriani, Mashita Dewi Tidore

This study aims to explore the class-based capital (economic, cultural, social, and symbolic) owned by working women, and how they articulate and negotiate it to navigate the patriarchal, hegemonic Balinese social system and the capitalist market. Second, to elaborate on how class/capital positions condition working women's agency in Bali. This study is framed with qualitative methods using participant observation and in-depth interviews with sixteen (16) working women informants in Bali based on catur varna (work profession in Balinese Hinduism), namely brahmana varna (academics, researchers, and ceremony leaders), kesatria varna (bureaucrats, politicians who work in regional government offices, BUMN, BUMD), wesia varna (traders and entrepreneurs), and sudra varna (labor workers). The sixteen informants were grouped into dominant, middle, and lower classes. The grouping and class analysis were based on Pierre Bourdieu's framework, supplemented by Antonio Gramsci and critical feminists. This study resulted in a mapping of class and articulation, namely, the dominant class is Balinese female agents who have a high volume and composition of capital, the ability to convert capital into other capital, and power, namely the ability and flexibility to articulate meaning and value within the customary structure. Meanwhile, the middle class is Balinese women with a volume and composition of capital at the middle level; their power and habitus character try to adopt culture even though it causes tension and anxiety. Meanwhile, the lower class (working class) are Balinese female agents with low capital; their life needs are filled with struggle and need. This study concludes: first, the typology of Balinese female agency is depicted as being transformative, the middle class as negotiative, and the lower class as accommodative. Second, Balinese women as a whole have succeeded in articulating and negotiating capital in the customary realm, but have failed in the global capitalist market.

Keywords: Articulation, Balinese Custom, Agency, Negotiation, Balinese Women, Workers

Dynasty Power of Sayye': Analisis Teori Struktural Fungsional di Tengah Hegemoni Endogamous Marriage sebagai Modernisasi Sosial pada Masyarakat Cikoang

Fadhil Perdana, Aluna Putri Sagita

Praktik perkawinan sekufu atau endogamous marriage yang diwajibkan bagi perempuan bergelar Sayye' di Desa Cikoang, Kabupaten Takalar, terus dipertahankan di tengah arus modernisasi sosial. Pelestarian tradisi ini kerap memicu problematika sosial yang pelik, termasuk ancaman sanksi sosial ammere' yang berisiko pada pengusiran keluarga serta munculnya tekanan psikologis dan perjodohan paksa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hegemoni endogamous marriage melalui pisau analisis Teori Struktural Fungsional, serta mengevaluasi bagaimana regulasi adat tersebut berbenturan dengan realitas modernisasi sosial dan hak-hak perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan etnografi melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan 22 informan kunci, yakni perempuan Sayye', tokoh adat, pemerintah desa, KUA, hingga Pengadilan Agama. Pendekatan kuantitatif menggunakan metode survei dengan kuesioner skala Guttman kepada 80 sampel perempuan Sayye' yang ditentukan melalui rumus Slovin. Temuan penelitian menunjukkan bahwa endogamous marriage dipertahankan karena ditopang oleh keberadaan lembaga adat Kerajaan Laikang, internalisasi pappaseng (nasihat leluhur), serta ketakutan terhadap sanksi sosial ammere'. Di satu sisi, tradisi ini dipandang positif sebagai bentuk perlindungan kemurnian nasab dan penjagaan keharmonisan keluarga. Namun di sisi lain, mayoritas perempuan Sayye' merasakan dampak negatif berupa hilangnya kebebasan memilih pasangan, tekanan psikologis, pembatasan ruang interaksi, hingga potensi kasus perkawinan anak akibat ambisi penjagaan strata. Studi ini menyimpulkan bahwa praktik endogamous marriage di Cikoang berfungsi untuk mempertahankan integrasi dan stratifikasi sosial kelompok, namun di sisi lain menimbulkan disfungsi struktural yang merugikan hak-hak otonomi dan kesejahteraan perempuan Sayye'. Diperlukan harmonisasi antara pelestarian identitas kultural lokal dengan prinsip keadilan sosial serta perlindungan hak asasi manusia di era modern.

Kata kunci: Sayye', Endogamous Marriage, Modernisasi Sosial, Teori Struktural Fungsional

Strategic Invisibility: Women's Political Campaigns in Conservative Religious Contexts

Teuku Muzaffarsyah, M. Akmal, Naidi Faisal

This study develops "strategic invisibility" as a theoretical concept explaining how women achieve electoral success in ultra-conservative religious contexts where political visibility creates vulnerability. Through qualitative research with seven elected female legislators in Lhokseumawe, Aceh Indonesia's only province implementing Islamic law demonstrate that successful female candidates paradoxically minimize public campaign presence while building hidden electoral networks. This challenges conventional assumptions that visibility benefits all candidates equally. Our analysis reveals gender-specific mechanisms: kinship networks provide legitimacy-borrowing rather than resource mobilization; financial barriers stem from systematic exclusion, not merely resource scarcity; and religious discourse actively delegitimizes women's political authority. Despite representation increasing from 8% (2014) to 28% (2024), persistent gaps below Indonesia's 30% quota reveal enforcement failures that paradoxically undermine women's legitimacy. Strategic invisibility extends theories of everyday resistance to formal electoral politics, offering analytical tools applicable to contexts where religious authority intersects with democratic institutions globally.

Keywords: Strategic invisibility; Women's political participation; Gender stereotypes; Islamic contexts; Indonesia; Campaign strategies; Aceh

PANEL 9 - Politik Lokal, Identitas, dan Masyarakat

Relasi Sosial dan Politik Identitas dalam Kebijakan Desentralisasi di Palangka Raya

Handi Winata, Selvi Rantika Tera Natasya

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana relasi sosial memengaruhi politik identitas, distribusi sumber daya, dan kewenangan dalam kebijakan desentralisasi di Kota Palangka Raya. Penelitian ini berangkat dari gagasan bahwa meskipun desentralisasi telah memberikan kesempatan bagi kelompok identitas lokal untuk berpartisipasi dalam politik, kekuatan relasi sosial dan dominasi kelompok tetap memengaruhi akses ke sumber daya politik dan ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan dirancang sebagai studi kasus di Kota Palangka Raya. Sebanyak 30 informan penelitian berasal dari berbagai kelompok etnis dan sosial, seperti pejabat pemerintah, anggota partai politik, tokoh masyarakat, dan orang umum. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang melibatkan observasi partisipatif dan pedoman semi-terstruktur. Analisis tematik induktif digunakan untuk mengidentifikasi pola relasi sosial, representasi politik, akses sumber daya, dan identitas politik. Dengan memanfaatkan audit sejawat dan triangulasi antara hasil wawancara dan observasi, validitas data diperkuat. Penelitian menunjukkan bahwa relasi sosial adalah mekanisme penting untuk menghubungkan identitas kelompok dengan pembagian sumber daya dan otoritas politik. Kelompok yang memiliki hubungan yang lebih kuat dengan pemerintah dan elit politik cenderung memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan kesempatan untuk kemajuan. Sebaliknya, kelompok yang memiliki hubungan yang lebih lemah dengan pemerintah dan elite politik cenderung memiliki lebih sedikit kesempatan untuk mengakses sumber daya ekonomi dan politik. Situasi ini menyebabkan konflik dan persepsi ketidakadilan di antara kelompok identitas lokal, terutama masyarakat Dayak. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa penguatan relasi sosial dan pembentukan aliansi strategis dengan pemerintah dan kelompok lain dapat meningkatkan kemampuan kelompok lokal dan organisasi masyarakat sipil untuk memengaruhi kebijakan publik. Penelitian menunjukkan bahwa desain kelembagaan dan pembagian kewenangan formal bukan satu-satunya faktor yang menentukan efektivitas desentralisasi; struktur relasi sosial yang membentuk akses terhadap sumber daya, kekuasaan, dan representasi politik juga berperan. Dengan melihat relasi sosial sebagai sarana untuk menghubungkan politik identitas dan distribusi kewenangan dalam kebijakan lokal, perspektif relasional memberikan kontribusi unik. Akibatnya, kebijakan desentralisasi Palangka Raya harus diorientasikan pada pendekatan yang lebih inklusif melalui penguatan forum diskusi antarkelompok, transparansi, partisipasi masyarakat, dan keterlibatan kelompok identitas yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan.

Kata kunci: relasi sosial; politik identitas; desentralisasi; distribusi sumber daya; Palangka Raya

Pengaruh Religiusitas dan Elite Politik dalam Pembangunan Tempat Hiburan di Banda Aceh

Muhammad Vikram, Annisah Putri, Rizfa Maghfirah, Reza Mahendra

Kota Banda Aceh sering dipersepsikan sebagai ruang sosial yang merepresentasikan nilai-nilai keislaman paling kuat di Indonesia. Kondisi tersebut tercermin melalui penerapan berbagai qanun berbasis syariat serta budaya masyarakat yang religius. Namun, di tengah potensi ekonomi dan urbanisasi yang meningkat, ketiadaan fasilitas hiburan modern seperti mall, bioskop, dan karaoke menimbulkan pertanyaan mengenai akar dari penolakan sosial terhadap modernisasi ruang publik tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur apakah sikap penolakan tersebut merupakan refleksi nilai-nilai masyarakat agamis, atau justru konstruksi elite politik yang memanfaatkan simbol keagamaan untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi kasus di Banda Aceh untuk menelusuri hubungan antara religiusitas, pengaruh elite, dan sikap publik terhadap pembangunan fasilitas hiburan modern. Data ini dikumpulkan melalui survey yang disebarkan kepada masyarakat luas yang mewakili keragaman demografis dan tingkat religiusitas. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola interaksi antara nilai-nilai agama dan framing elite politik dalam membentuk opini publik. Temuan awal menunjukkan bahwa penolakan terhadap modernisasi ruang publik tidak semata-mata bersumber dari nilai keagamaan masyarakat, melainkan juga terkait dengan konstruksi politik identitas yang dikelola oleh elite lokal untuk menjaga legitimasi sosial dan politiknya. Studi ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana agama, kekuasaan, dan persepsi publik berinteraksi dalam konteks pemerintahan lokal yang berbasis syarit.

Kata kunci: religiusitas, politik identitas, opini publik, elite lokal, Banda Aceh

Manajemen Konflik Dualisme Pusat Pemerintahan di Kabupaten Buton Utara

Inan Fauziyah, Ibrayoga Rizki Perdana

Penelitian ini mengkaji fenomena dualisme pusat pemerintahan di Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu kondisi ketika status ibu kota Buranga secara hukum berbeda dengan pusat penyelenggaraan pemerintahan Ereke secara faktual. Berbeda dengan perspektif konvensional yang memandang dualisme ini sebagai kegagalan perencanaan atau konflik yang belum terselesaikan, penelitian ini berargumen bahwa dualisme tersebut merupakan hasil dari strategi pengelolaan konflik yang dijalankan secara berkelanjutan oleh aktor pemerintah dan nonpemerintah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi aktor-aktor politik kunci, menganalisis praktik dan strategi pengelolaan yang mereka gunakan, serta menjelaskan bagaimana interaksi berbagai strategi tersebut membentuk dan mempertahankan dualisme pusat pemerintahan sebagai tatanan yang stabil. Dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, penelitian ini menerapkan teori lingkaran konflik oleh Christopher W. Moore dengan memfokuskan analisis pada tiga dimensi, yaitu struktural, nilai, dan kepentingan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis melalui kondensasi dan kodifikasi data tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme pusat pemerintahan lahir dari kebuntuan bersama kelompok Buranga dan Ereke dalam memaksakan penyelesaian secara sepihak, yang kemudian mendorong negosiasi non-zero sum melalui koalisi elektoral pada tahun 2015. Keberlangsungan dualisme ini ditopang oleh tiga mekanisme yang saling terkait, yaitu pembedaan fungsi kelembagaan pada dimensi struktural, akomodasi identitas dan pemaknaan historis pada dimensi nilai, serta power-sharing dan resource-sharing pada dimensi kepentingan. Ketiga dimensi tersebut bekerja saling menopang sehingga dualisme mampu bertahan secara stabil selama hampir dua dekade tanpa kembali menjadi konflik terbuka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dualisme pusat pemerintahan merupakan mekanisme manajemen konflik spasial yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan tetap berlangsung di tengah keberlanjutan perbedaan antara status hukum dan praktik yang faktual.

Kata kunci: Dualisme Pusat Pemerintahan; Manajemen Konflik; Negosiasi Politik

New Autonomous Region Or Stronger Service Delivery? a Comparative Policy Framework from Bogor Selatan, Indonesia

Mudiyati Rahmatunnisa, Nanang Suryana

This paper seeks to explore how governments should make the choice between the creation of a New Autonomous Region (Daerah Otonom Baru, DOB) or the reinforcement of decentralized nodes of service delivery to tackle subregional governance and public service deficits. Using the case of Bogor Selatan in Indonesia, it questions the premise that administrative proximity justifies a new territorial government. This paper builds a framework of problem-function-scale-institution and applies it through a qualitative case study of eight subdistricts in Bogor Selatan. Using views of place-based development, territorial capital, spatial justice, fiscal capacity and multi-level governance, evidence from stakeholder consultation, field observation and secondary administrative data is interpreted. Four institutional scenarios for DOB creation, decentralized service hubs, enhanced functional-area governance and a hybrid sequential method are evaluated against a common set of criteria covering service, fiscal, institutional, spatial and environmental aspects. The case shows that service and development deficits are shaped by multiple and interacting constraints, including unequal access to basic facilities, barriers to land acquisition, incomplete spatial-planning instruments, fragmented authority and weak integrated data. These problems are not to be assumed to respond uniformly to territorial restructuring. Our analysis distinguishes between access deficits, authority deficits and coordination deficits, each implying different institutional requirement. It recommends considering service proximity, decision-making authority and cross-boundary coordination separately before selecting a territorial reform strategy. The paper offers a diagnostic framework to link territorial problems with governmental functions and suitable institutional scales. Rather than presenting DOB formation and decentralized service delivery as either mutually exclusive or universal solutions, it develops a conditional, evidence-based approach to territorial reform. The framework can inform more transparent and equitable decisions about institutional restructuring, but more fiscal and spatial data are needed to assess comparative outcomes.

Keywords: New Autonomous Regions; territorial reform; administrative decentralization; public service delivery; fiscal sustainability; Indonesia

Resistensi Politik Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Barat terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla)

Herri Junius Nge, Ahirul Habib Padila, Kartoyo Antonius

Kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat telah memicu respons kebijakan dari pemerintah pusat, termasuk instruksi Presiden agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencabut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal. Instruksi tersebut langsung menuai penolakan keras dari berbagai organisasi masyarakat adat Dayak yang menilai kebijakan tersebut mengancam hak dan tradisi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis resistensi politik masyarakat Adat Dayak Kalimantan Barat terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penelitian ini dikaji dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi politik masyarakat Adat Dayak Kalimantan Barat melalui aksi demonstrasi langsung maupun perlawanan melalui media sosial terjadi karena adanya kebijakan pemerintah dalam penanganan karhutla yang terkesan insidental dan panik, dengan menyalahkan aktivitas pembakaran lahan oleh peladang sebagai biang keladi terjadinya kasus karhutla. Para Tokoh Adat, Politisi dan Ormas Adat Dayak secara tegas menolak pencabutan Perda tersebut tanpa kajian komprehensif dan tanpa adanya solusi alternatif yang jelas bagi masyarakat peladang tradisional. Perda Nomor 1 Tahun 2022 merupakan penjabaran teknis dari Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamanatkan pemerintah untuk memperhatikan kearifan lokal. Masyarakat adat menuntut pemerintah membedakan secara tegas antara pembakaran lahan untuk perladangan tradisional dengan pembakaran hutan oleh korporasi, serta tidak menjadikan peladang tradisional sebagai kambing hitam penyebab kabut asap. Fenomena ini mencerminkan ketegangan antara kebijakan lingkungan nasional yang bersifat seragam dengan realitas sosiokultural masyarakat adat di daerah, di mana regulasi yang seharusnya melindungi kearifan lokal justru berpotensi dikriminalisasi demi respons cepat terhadap krisis karhutla. Aksi demonstrasi masyarakat Dayak menjadi manifestasi dari resistensi terhadap kebijakan yang dinilai tidak partisipatif dan tidak sensitif terhadap konteks lokal, sekaligus menyoroti pentingnya partisipasi politik masyarakat adat dalam proses legislasi daerah yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Penelitian ini merekomendasikan perlu adanya kesimbangan antara kebijakan pemerintah dalam menangani issu lingkungan dengan aspek perekonomian masyarakat dan nilai kearifan lokal.

Kata kunci: Resistensi Politik, Masyarakat Dayak, Kebijakan Pemerintah, Karhutla

Democratic Backsliding at the Local Level: the Appointment of Acting Village Heads (Pj) in the 2024 Sampang Regional Elections

M. Zainor Ridho

In this study, the problems of acting heads of Pj village in Sampang Regency that were taking place before 2024 Simultaneous Regional Elections (Pilkada Serentak) will be studied. In theory, the problem with the vacant position of the village head should be solved impartially without any political aspects. In practice, however, this mechanism might be impacted by the political considerations of the upcoming elections, and the role of acting village heads would be used for political dominance on the part of the political elite of the area. The described situation represents the symptoms of democratic backsliding in the sphere of village management, which was supposed to be the most relevant sphere of democracy from the perspective of its closeness to people's needs. The phenomenon indicates the presence of the signs of democratic backsliding in the local context, which was thought to be the closest to the interests of the people sphere of democracy. This study aims to resolve two main problems, namely, the process of acting heads of Sampang Regency village heads appointment regarding the 2024 Pilkada competition and the dynamics of democratic backsliding due to the power relations between the local government, political actors, and acting village heads. The construction of the research is based on the theories of democratic erosion (Levitsky & Ziblatt), local elites' theory (local elites' capture), and patron-client theory. It was found that the appointment of Acting Village Heads in Sampang was not only a bureaucratic process for filling the vacant position, but also a political one intended to ensure the success of the struggle of 2024 for the position of Pilkada. The lack of transparency and involvement of the public in the process is evidence of the weakening of independence of the village's bureaucracy and the breakdown of the principle of neutralization necessary for the functioning of democracy. The results prove that democratic erosion can occur legally but affects local democracy nevertheless.

Keywords: democratic backsliding, Acting Village Head, local elites, bureaucratic neutrality

Social Capital and Local Community Identity in Strengthening the Politics of Village Development in North Kalimantan

Lusi Andriyani, Edy Delvianus Malisan, Ali Noer Zaman

Social capital and local community identity are important dimensions of village development politics, particularly in fostering trust, strengthening community participation, and shaping relationships between government institutions and local communities. This study aims to analyze the role of social capital and local community identity in strengthening the politics of village development, focusing on Tana Tidung Regency, North Kalimantan, under the leadership of Regent Ibrahim Ali. The research employs a qualitative case study approach using in-depth interviews, field observations, and document analysis across four villages: Sebidai, Sepala Dalung, Kapuak, and Mendupo. The analytical framework draws on the social capital perspective, complemented by Peter Schröder's political strategy theory, political communication, collaborative governance, and the principles of recognition and subsidiarity in village autonomy. The findings indicate that social capital, reflected in interpersonal trust, solidarity, mutual cooperation, social networks, and the involvement of religious and community leaders, constitutes an important collective resource supporting village development. These social practices also reflect shared values and community attachment that can be interpreted as dimensions of local identity. Within local political dynamics, social networks and community actors help facilitate communication between local governments and citizens, expand opportunities for participation, and support the formation of political legitimacy through development policies. Nevertheless, the effectiveness of social capital remains constrained by limited resources, unequal infrastructure access, institutional capacity challenges, and post-electoral political dynamics. The study concludes that strengthening village development politics requires the integration of political leadership, social capital, recognition of local community characteristics, and participatory governance. This research contributes to local political studies by demonstrating that village development is not merely an administrative process or a mechanism for distributing resources, but also a political process shaped by interactions among political power, social trust, and the collective values of local communities.

Keywords: Social capital; Local community identity; Development politics; Community participation; Local politics

PANEL 10 - Kontestasi Elektoral dan Representasi Politik

Modal Sosial, Modal Moral, dan Politik Digital Caleg Perempuan di Papua pada Pemilu 2024

Audra Jovani, Chontina Siahaan, Godefridus Samderubun

Transformasi digital telah mengubah pola komunikasi, partisipasi, dan mobilisasi politik dalam pemilu di Indonesia. Media sosial dan platform digital memberikan ruang bagi kandidat untuk memperluas jaringan, meningkatkan visibilitas, menyampaikan pesan politik, dan berinteraksi dengan pemilih. Namun, perkembangan politik digital tidak serta-merta menghilangkan pentingnya relasi sosial, kepercayaan, dan legitimasi yang telah terbentuk dalam masyarakat. Kondisi tersebut penting untuk memahami kontestasi caleg perempuan di enam provinsi Papua pada Pemilu 2024. Kajian mengenai keterwakilan perempuan dalam pemilu cenderung membahas modal sosial, karakter dan integritas kandidat, serta penggunaan media digital secara terpisah. Masih terbatas kajian yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut untuk menjelaskan bagaimana kepercayaan dan legitimasi dibangun, dukungan dimobilisasi, serta bagaimana proses tersebut berkaitan dengan hasil elektoral caleg perempuan, khususnya dalam konteks Papua. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana modal sosial dan modal moral caleg perempuan berinteraksi dengan politik digital dalam membangun dukungan politik pada Pemilu 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, analisis dokumen dan informasi kepemiluan, serta analisis isi terhadap aktivitas media sosial dan jejak digital kandidat yang dapat diakses secara publik. Modal sosial dipahami melalui jaringan dan relasi yang memungkinkan kandidat memperoleh akses, dukungan, dan sumber daya politik, sedangkan modal moral berkaitan dengan nilai, integritas, tanggung jawab, kepedulian, dan konsistensi tindakan yang menjadi dasar penilaian serta kepercayaan terhadap kandidat. Kerangka analisis menempatkan modal sosial dan modal moral sebagai sumber pembentukan kepercayaan dan legitimasi politik yang selanjutnya memengaruhi mobilisasi dukungan, perolehan suara, dan keterpilihan. Politik digital ditempatkan sebagai mekanisme penguat yang dapat memperluas visibilitas, komunikasi, dan jangkauan jaringan politik kandidat. Karena penelitian masih berlangsung, argumentasi awal menunjukkan bahwa media digital tidak menggantikan jaringan sosial caleg perempuan, tetapi berinteraksi dengan jaringan interpersonal, komunitas, organisasi, dan relasi sosial kandidat. Visibilitas digital juga tidak dengan sendirinya menghasilkan dukungan elektoral apabila tidak disertai kepercayaan dan legitimasi. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi modal sosial, modal moral, dan politik digital dalam satu kerangka analisis yang menghubungkan sumber daya sosial dan moral kandidat dengan kepercayaan, legitimasi, mobilisasi dukungan, dan hasil elektoral. Penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap kajian politik digital dan representasi perempuan dengan menjelaskan bagaimana digitalisasi berinteraksi dengan sumber daya sosial dan moral dalam kontestasi politik perempuan di Papua.

Kata kunci: caleg perempuan; modal sosial; modal moral; politik digital; Papua; Pemilu 2024

Pemilu Inklusif dalam Institusi Rehabilitasi: Adaptasi Peran KPU dalam Memfasilitasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Jiwa pada Pemilu 2024

Restia Nova Winata

Penyelenggaraan pemilu inklusif tidak hanya ditentukan oleh pengakuan normatif terhadap hak pilih, tetapi juga oleh kemampuan penyelenggara pemilu dalam menyesuaikan pelayanan dengan kondisi pemilih yang memiliki kebutuhan khusus. Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika penyandang disabilitas jiwa berada dalam institusi rehabilitasi dengan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dari pemilih pada umumnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis adaptasi peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pemalang dalam memfasilitasi hak pilih penyandang disabilitas jiwa di Rumah Rehabilitasi Samekto Karti pada Pemilu 2024 serta mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak KPU Kabupaten Pemalang serta dokumentasi terkait penyelenggaraan pemilu di Samekto Karti. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adaptasi peran KPU dilakukan melalui beberapa bentuk fasilitasi, yaitu pemutakhiran data pemilih, koordinasi dengan pihak Rumah Rehabilitasi Samekto Karti dan PPK, penyediaan TPS Lokasi Khusus (TPS Loksus), sosialisasi secara langsung melalui diskusi interaktif, serta simulasi pemungutan suara dengan menggunakan perangkat yang menyerupai kondisi pemungutan suara sebenarnya. KPU juga melakukan penyesuaian komunikasi dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan penghuni yang mengikuti kegiatan sosialisasi. Selain itu, petugas TPS yang berasal dari pengelola panti memperoleh pembekalan dan diarahkan untuk memberikan pendampingan tanpa memengaruhi pilihan pemilih. Hambatan yang ditemukan antara lain perubahan data penghuni, kondisi psikososial pemilih yang dinamis, serta kebutuhan peningkatan pemahaman petugas melalui pembekalan lanjutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemilu inklusif dalam institusi rehabilitasi membutuhkan peran penyelenggara pemilu yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga adaptif dan proaktif. Adaptasi melalui pelayanan, komunikasi, koordinasi, simulasi, serta penyediaan TPS Loksus menjadi bagian penting dalam membuka akses penggunaan hak pilih bagi penyandang disabilitas jiwa. Dengan demikian, kualitas demokrasi elektoral pada kelompok rentan turut ditentukan oleh kemampuan kelembagaan penyelenggara pemilu dalam menerjemahkan prinsip kesetaraan hak ke dalam praktik pelayanan yang sesuai dengan konteks pemilih.

Kata kunci: pemilu inklusif; disabilitas mental; hak pilih; KPU; TPS Lokasi Khusus (TPS Loksus)

Pola Trajektori Elektoral Partai Politik di Indonesia pada Pemilu 1999–2024

Andi Suwarko

Dukungan elektoral partai politik di Indonesia sering digambarkan cair dan sulit diprediksi, tetapi gambaran itu jarang diuji pada tingkat partai untuk seluruh rangkaian pemilu demokratis. Artikel ini menganalisis pola trajektori elektoral sebelas partai politik pada enam pemilu legislatif DPR RI (1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024). Dengan desain deskriptif-komparatif longitudinal, perolehan suara dikonversi menjadi persentase suara sah dan perolehan kursi menjadi persentase kursi. Setiap partai kemudian diklasifikasikan ke dalam empat tipe trajektori, yaitu pertumbuhan elektoral/electoral growth (T1), penurunan elektoral/electoral decline (T2), fluktuasi elektoral/elevtoral fluctuatif (T3), dan kebangkitan elektoral/electoral resurgence (T4), melalui aturan koding eksplisit yang diuji ulang dengan suara absolut, kursi, dan 288 kombinasi ambang. Hasilnya menunjukkan dua partai bertipe T1 (Gerindra dan NasDem), empat partai bertipe T2 (PPP, PBB, Demokrat, dan Hanura), empat partai bertipe T3 (PDIP, Golkar, PAN, dan PKS), dan satu partai bertipe T4 (PKB). Sembilan dari sebelas klasifikasi stabil pada semua kombinasi ambang, sedangkan PDIP dan PPP merupakan kasus batas. Ambang batas parlemen mengubah penurunan elektoral yang bertahap menjadi kehilangan kursi secara mendadak, sementara indeks volatilitas parsial turun dari 21,74 poin pada 2009 menjadi 5,32 poin pada 2024. Artikel ini menawarkan tipologi yang dapat direplikasi serta empat proposisi yang menghubungkan tipe lintasan dengan kedekatan pada kandidat presiden, personalisasi partai, basis sosial-organisasional, dan ambang batas parlemen.

Kata kunci: trajektori elektoral; partai politik; volatilitas elektoral; sistem kepartaian Indonesia; pemilu legislatif; ambang batas parlemen

Keterputusan Hubungan Representasi antara Gerakan Perempuan Akar Rumput dan Anggota Legislatif Perempuan di Wilayah Konflik Sumber Daya Alam

Sri Budi Eko Wardani, Esty Ekawati, Nurul Nurhandjati

Studi ini meneliti keterputusan hubungan antara gerakan perempuan akar rumput dan anggota legislatif (aleg) perempuan di DPRD pada wilayah yang mengalami konflik sumber daya alam, dengan fokus khusus pada masyarakat adat di Pati dan Toba Simalungun. Di wilayah-wilayah tersebut, gerakan perempuan akar rumput aktif mempertahankan ruang hidup dan lingkungan hidup mereka dari ancaman kerusakan lingkungan serta penggusuran. Namun, upaya gerakan akar rumput perempuan ini menghadapi tantangan sistemis yang signifikan sehingga memicu kondisi misrekognisi dan maldistribusi hak maupun sumber daya. Riset kualitatif menemukan perempuan wakil di daerah konflik sumber daya alam yang melibatkan masyarakat adat (Pati dan Toba Simalungun), dalam praktik representasinya tidak membangun kontak dengan gerakan perempuan di akar rumput yang berjuang mempertahankan ruang hidup dan lingkungan mereka selama bertahun-tahun berhadapan dengan negara (pemerintah) dan kekuatan kapital (pengusaha). Artikel ini menganalisis penyebab terjadinya keterputusan hubungan tersebut dengan menggunakan kerangka teori keadilan dari Nancy Fraser, representasi (deskriptif dan substantif), serta ekofeminisme, yang mengidentifikasi empat faktor penyebab: (1) pemahaman aleg perempuan yang memisahkan isu lingkungan dan relasi kultural-spiritual perempuan akar rumput (seperti filosofi “Ibu Bumi” atau kedaulatan tanah adat) dari isu/kepentingan perempuan; (2) kuatnya hegemoni wacana teknokratis-ekstraktif di kalangan partai politik; (3) orientasi kebijakan daerah yang menitikberatkan pada investasi kapital dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta (4) ketidakpastian kerangka legalitas masyarakat adat dalam regulasi daerah maupun nasional. Temuan penelitian menunjukkan terjadinya misrepresentasi, di mana hadirnya perempuan di lembaga legislatif secara kuantitatif terbukti tidak cukup untuk menjamin lahirnya keberpihakan pada isu-isu substantif perempuan akar rumput dan keadilan ekologis. Studi ini menegaskan pentingnya memperluas fokus representasi politik perempuan agar mencakup keadilan lingkungan dan tata kelola sumber daya alam.

Kata kunci: Gerakan Perempuan Akar Rumput, Politisi Perempuan, Konflik Sumber Daya Alam, Representasi Substantif, Ekofeminisme, Keadilan Lingkungan

The Quota without Cadres: Layered Discrimination Against Women in Political Parties and Election Management Bodies in West Java, Indonesia

Fitriyani Yuliawati, Hendra Gunawan, Nisa Khoerunisa

Since Indonesia introduced a 30 percent quota for women candidates in 2017, women's political representation has continued to face significant challenges, with limited progress toward substantive representation. West Java, Indonesia's most populous province and a major electoral arena, illustrates this persistent gap: women remain underrepresented in provincial and local legislatures and in election management bodies, while gender-based discrimination in public life continues to constrain their political participation. This study examines why affirmative action has not translated into meaningful political inclusion in West Java by investigating gendered barriers across three interconnected arenas: the electorate, political parties, and election management bodies. It addresses three questions: (1) what barriers constrain women's political representation, including the reproduction of patriarchal norms through women's own political attitudes; (2) how political parties implement the 30 percent candidacy quota in candidate recruitment and cadre development; and (3) what institutional and political factors explain women's continued underrepresentation in the General Elections Commission (KPU) and the Election Supervisory Agency (Bawaslu). The study employs a qualitative, multi-site case study design in selected cities and regencies of West Java, including Tasikmalaya City and Banjar City, building on the authors' previous research on women's political representation and female voters' resistance to women candidates. Data were collected through in-depth interviews with women legislative candidates and elected representatives, party officials responsible for candidate recruitment, women's organizations, and members of KPU and Bawaslu selection committees. These interviews were complemented by documentary analysis of candidate lists, party regulations on cadre development, and data on the gender composition of legislatures and election management bodies. The analysis draws on Pitkin's concept of political representation and feminist institutionalism. The findings reveal three mutually reinforcing barriers. First, political parties provide limited opportunities for women's cadre development. The quota is often treated as an administrative requirement for candidate-list eligibility rather than as a commitment to gender equality. Consequently, women may be recruited shortly before candidate registration, including through family connections with party elites or their public visibility, while receiving limited political training and few strategic responsibilities. Second, patriarchal norms embedded in social and religious contexts shape political attitudes and are sometimes internalized by women voters, contributing to doubts about women candidates' competence and preferences for male candidates. Third, women candidates receive insufficient structural and political support, as reflected in less competitive list positions, limited campaign funding, and restricted access to party machinery and political networks. Similar patterns of underrepresentation are evident in election management bodies, where gender-related provisions and considerations have not ensured women's representation at the 30 percent threshold, amid selection processes shaped by male-dominated institutional networks. The study concludes that affirmative action has generated procedural compliance without consistently securing substantive political representation. Advancing women's political inclusion in West Java requires a shift from numerical compliance toward transformative affirmative action. This entails strengthening women's cadre development within political parties, establishing enforceable accountability for tokenistic nominations, expanding financial and organizational support for women candidates, improving gender-responsive recruitment

and selection in election management bodies, and promoting political education that challenges patriarchal norms among voters.

Keywords: women's political representation; gender quota; political parties; election management bodies; social justice

Dari Ideologi ke Elektabilitas: Konvergensi Rasionalitas Elektoral Partai Politik dalam Pilkada Calon Tunggal 2024 di Kota Surabaya

Darsono, Basa Alim Tualeka, Mandra Nur Alia

Pilkada Serentak 2024 di Kota Surabaya menghadirkan fenomena calon tunggal--pasangan Eri Cahyadi–Armuji yang diusung oleh PDIP--memperoleh dukungan dari 18 partai politik, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Garuda, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Ummat, Partai Perindo, dan Partai Buruh. Dukungan lintas partai tersebut menghadirkan fenomena konsolidasi dukungan politik yang luas dan menghasilkan situasi calon tunggal yang mempertemukan partai-partai dengan perbedaan ideologi, sejarah organisasi, basis pemilih, dan kekuatan elektoral. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan partai politik dalam menentukan dukungan pada Pilkada Kota Surabaya 2024, terutama hubungan antara orientasi ideologis, kaderisasi, struktur pengambilan keputusan, dan kalkulasi elektoral. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus partai politik dan penelusuran dokumen terkait dinamika pencalonan dan hasil Pemilu legislatif. Analisis diarahkan pada proses pengambilan keputusan partai, pertimbangan terhadap kandidat kader maupun nonkader, penggunaan hasil survei, dan persepsi mengenai peluang kemenangan. Temuan wawancara menunjukkan kecenderungan pertimbangan yang relatif serupa, yaitu keputusan pencalonan dan dukungan politik tidak hanya ditentukan oleh identitas ideologis atau kepentingan kaderisasi, tetapi yang lebih utama dan mengemuka adalah elektabilitas kandidat, hasil survei, peluang kemenangan, serta arahan dan koordinasi antartingkatan organisasi partai. Dalam proses tersebut, keputusan di tingkat pusat berinteraksi dengan komunikasi dan pertimbangan pengurus wilayah maupun cabang. Kader partai tetap menjadi pilihan ketika dinilai layak dan memiliki peluang elektoral, tetapi dukungan terhadap tokoh nonkader juga dimungkinkan apabila dipandang lebih menjanjikan secara elektoral. Hasil penelitian menunjukkan kecenderungan yang relatif serupa di antara partai-partai yang diteliti, yaitu menguatnya pertimbangan elektoral dalam menentukan kandidat dan dukungan politik. Elektabilitas, hasil survei, serta persepsi mengenai peluang kemenangan menjadi pertimbangan penting, termasuk dalam membuka kemungkinan dukungan kepada tokoh nonkader. Meskipun demikian, terdapat variasi di antara partai-partai non-PDIP dalam mekanisme pengambilan keputusan dan penempatan kaderisasi dalam proses pencalonan. Temuan ini memperlihatkan bahwa orientasi elektoral tidak selalu menghapus pertimbangan ideologis dan kaderisasi, tetapi cenderung menempatkannya dalam hubungan yang lebih instrumental dengan kalkulasi kemenangan. Penelitian ini berargumen bahwa fenomena calon tunggal di Surabaya mencerminkan kecenderungan pragmatisme elektoral dan konvergensi strategi partai yang berpotensi membatasi ruang kompetisi, fungsi diferensiasi partai, dan kualitas representasi dalam demokrasi lokal. Dengan demikian, kasus Surabaya memberikan kontribusi bagi kajian mengenai perilaku partai politik, rasionalitas pencalonan, dan kualitas demokrasi lokal di Indonesia.

Kata kunci: partai-politik; konvergensi-rasionalitas-elektoral; pragmatisme-politik; calon-tunggal; demokrasi-lokal

Rasionalitas Pemilih Tuna Aksara Pasca Pemilu 2024 di Kabupaten Bulukumba

Fajar Alamsyah

Pemilu 2024 masih menyisakan kelompok masyarakat tertentu yang mengalami kendala dalam menyalurkan hak pilihnya, salah satunya adalah pemilih tuna aksara. Sampai saat ini belum terdapat solusi terkait penyelenggaraan pemilu yang inklusif bagi pemilih tuna aksara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respons dan mengukur rasionalitas pemilih tuna aksara. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain paralel konvergen yang melibatkan survei terhadap 113 pemilih tuna aksara dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 77 persen pemilih tuna aksara terpengaruh oleh faktor eksternal seperti janji politik dan pemberian barang. Analisis menggunakan Rational Choice Theory menunjukkan bahwa pemilih mempertimbangkan manfaat langsung (reward) dan biaya (cost) dalam membuat keputusan politik. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan kategori pemilih yang rasional sehingga diperlukan strategi khusus untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik pemilih tuna aksara. Strategi tersebut meliputi perluasan makna ‘Disabilitas Lainnya’ termasuk pemilih tuna aksara pada ketentuan umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), pengintegrasian dan pemutakhiran data tuna aksara, dan inovasi sosialisasi berbasis non-anggaran. Implikasi penelitian ini menunjukkan hasil analisis indikator Rational Choice Theory bahwa pemilih tuna aksara terpengaruh oleh faktor eksternal.

Kata kunci: pemilu 2024; rational choice theory; tuna aksara

PANEL 11 - Tata Kelola, Ekonomi Politik, dan Pembangunan

The Illusion of Polycentricity: Pansus Trap, Institutional Friction, and Elite Re-bargaining in Bali's Coastal Governance

Gede Indra Pramana, I Ketut Putra Erawan, Ni Made Ras Amanda Gelgel

While polycentric governance frameworks conceptualize coastal management as a network of autonomous decision-making centers, this theoretical perspective frequently conceals structural power asymmetries and institutional friction within decentralized regimes. Purpose, This study critically analyzes coastal spatial contestation in Bali through the oversight interventions of the Special Committee on Spatial Planning, Assets, and Licensing (Pansus TRAP) established by the Bali Provincial Legislative Council (DPRD Bali). It argues that rather than producing balanced or participatory governance, polycentricity in Bali functions as an arena of elite re-bargaining, a framework where regional legislative actors leverage oversight mechanisms to regain political authority diluted by centralist deregulation under the national Job Creation Law (UU Cipta Kerja) and the Online Single Submission (OSS) system. To demonstrate these dynamics, the paper investigates two pivotal loci of spatial conflict: the 180-meter glass lift project at Kelingking Beach in Nusa Penida, Klungkung (PT BNP/PT Indonesia Kaishi), which illustrates high-risk cliffside commercialization enabled by central OSS permits that bypass regional disaster mitigation zoning; and the mangrove deforestation (62–82 hectares) and opaque land swap controversies at Tahura Ngurah Rai and KEK Kura Kura Bali (PT BTID) in Denpasar, which highlight the structural boundaries of provincial oversight when confronting nationally prioritized Special Economic Zones. Method, Adopting a qualitative approach, the study evaluates the power dynamics linking central ministries, provincial bodies, law enforcement agencies (Kejati/Kejari), corporate developers, and customary communities (Desa Adat). Results, the findings demonstrate that Pansus TRAP's high-profile site inspections, multi-agency public hearings (RDP), project sealings, and judicial referrals function primarily as tactical instruments of political leverage. Conclusion, Rather than dismantling centralist capital expansion, Pansus TRAP uses these tools to force central state actors and corporate developers back to the negotiating table to reassert regional spatial sovereignty. Ultimately, the "illusion" of polycentric governance lies in its failure to deliver genuine spatial justice, as regional legislative resistance remains confined to reactive elite bargaining while local customary rights and fragile coastal ecosystems remain subordinate to the imperatives of tourism capital.

Keywords: Polycentric governance; Spatial politics; Institutional friction; Coastal governance; Bali

Political Voice Perempuan dalam Komunikasi Politik Digital: Studi Kasus Elva Farhi Qolbina dan PSI Jakarta

Suryani, Ahmad Ziyad Shah Al Ayyubi

Ruang digital telah mengubah komunikasi politik dengan menyediakan model baru bagi politisi untuk membangun identitas, menyampaikan agenda, berinteraksi dengan masyarakat, dan mengartikulasikan kepentingan politik. Dalam konteks politik perempuan, ruang digital menjadi arena penting bagi politisi perempuan untuk membangun political voice dan memperkuat representasi politiknya. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana komunikasi politik digital membentuk political voice dan representasi politik perempuan melalui studi kasus Elva Farhi Qolbina dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui analisis isi terhadap materi komunikasi politik yang tersedia secara publik pada platform digital, meliputi unggahan media sosial, publikasi digital, materi komunikasi PSI Jakarta, dan pernyataan politik Elva Farhi Qolbina. Analisis menggunakan teori representasi politik Hanna Pitkin untuk melihat bagaimana representasi dibangun melalui artikulasi kepentingan, tindakan berbicara atas nama masyarakat, dan pembentukan hubungan antara wakil dengan yang diwakili. Konsep political voice digunakan untuk menganalisis kemampuan politisi perempuan dalam menyampaikan posisi, kepentingan, dan agenda politik melalui ruang digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi digital Elva Farhi Qolbina membentuk political voice melalui artikulasi isu publik, penyampaian posisi politik, dan konstruksi identitas sebagai politisi perempuan. Ruang digital tidak hanya digunakan sebagai sarana penyampaian informasi politik, tetapi juga sebagai ruang untuk membangun representasi diri dan hubungan dengan masyarakat. Representasi perempuan dalam komunikasi digital Elva menunjukkan adanya perpaduan antara identitas sebagai perempuan politisi, agenda politik, dan konstruksi citra personal. Dengan demikian, representasi politik perempuan tidak semata-mata ditampilkan melalui isu perempuan, tetapi juga melalui keterlibatan dalam persoalan publik yang lebih luas. Temuan penelitian juga menunjukkan adanya hubungan antara political voice individual Elva dengan komunikasi politik kelembagaan PSI Jakarta, meskipun komunikasi personal politisi memiliki ruang untuk membangun identitas politik yang lebih spesifik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi politik digital dapat menjadi arena pembentukan political voice perempuan yang tidak hanya memperluas ruang ekspresi politik, tetapi juga mengubah cara representasi politik dibangun dan dikomunikasikan kepada masyarakat. Perspektif representasi politik Pitkin membantu menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam politik tidak cukup dilihat dari keterwakilan secara numerik, tetapi juga dari kemampuan mengartikulasikan kepentingan dan membangun relasi representatif dengan masyarakat. Studi kasus Elva Farhi Qolbina memperlihatkan keterkaitan antara perempuan, partai politik, representasi politik, dan transformasi komunikasi politik di era digital.

Kata kunci: political voice; representasi politik; perempuan dalam politik; komunikasi politik digital; partai politik; PSI Jakarta

Urgensi Pengawasan Partisipatif Masyarakat dalam Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu di Indonesia

Ratnia Solihah, Siti Witianti, Mohammad Fazrulzaman Azm

Tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilihan umum merupakan tahapan strategis yang menentukan terpenuhinya persyaratan legalitas, kepengurusan, keanggotaan, dan kelayakan partai politik untuk mengikuti kontestasi elektoral. Namun, pelaksanaan tahapan tersebut dalam Pemilu 2024 menghadapi berbagai persoalan, terutama pencatutan identitas masyarakat sebagai anggota partai politik, ketidakakuratan data keanggotaan, serta keterbatasan akses pengawasan terhadap Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Fenomena tersebut memperlihatkan pentingnya pengawasan partisipatif masyarakat sebagai instrumen kontrol sosial dalam menjaga akurasi dan integritas proses verifikasi peserta pemilu. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi, bentuk, tantangan, dan kontribusi pengawasan partisipatif masyarakat dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan dokumentasi. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen KPU dan Bawaslu, serta literatur akademik yang relevan. Analisis dilakukan melalui kondensasi data, kategorisasi tematik, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif memiliki fungsi penting dalam mendeteksi pencatutan identitas, menguji kesesuaian data keanggotaan dengan kondisi faktual, serta memperkuat akuntabilitas verifikasi administrasi dan faktual. Akan tetapi, kontribusinya dipengaruhi oleh literasi kepemiluan, keterbukaan akses informasi, mekanisme pengaduan, dan responsivitas lembaga penyelenggara. Kajian ini menyimpulkan bahwa pengawasan partisipatif perlu dilembagakan sebagai mekanisme verifikasi sosial yang terintegrasi dengan pengawasan formal, tanpa menggantikan kewenangan verifikasi KPU.

Kata kunci: pengawasan partisipatif, verifikasi partai politik, Sipol, pencatutan identitas, integritas pemilu

Transformasi Tata Kelola Pengaduan Masyarakat DPR RI Melalui Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Muhammad Haekal Saniarjuna

Partisipasi publik dan representasi politik merupakan unsur penting dalam negara demokrasi. Namun, hubungan antara warga dan lembaga perwakilan dalam hal ini n DPR RI menghadapi tantangan ketika aspirasi masyarakat belum selalu terhubung secara sistematis dengan proses pengawasan, pembentukan kebijakan, dan tindak lanjut penyelesaian persoalan. Pengaduan yang telah diterima atau dibahas tidak dengan sendirinya menjamin adanya respons kelembagaan yang jelas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan representasi, melemahkan akuntabilitas, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan. Penelitian ini menganalisis pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI sebagai bentuk transformasi tata kelola pengaduan masyarakat. Analisis menggunakan teori representasi politik Hanna Pitkin untuk memahami hubungan antara aspirasi warga dan tindakan wakil rakyat, konsep meaningful participation untuk menilai keterlibatan publik yang bermakna, serta perspektif perubahan kelembagaan (institutional change) untuk membaca pembaruan struktur dan mekanisme pengelolaan aspirasi. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen, makalah ini menelaah fungsi BAM dalam menerima, menghimpun, dan menelaah aspirasi, melakukan pendalaman melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan kunjungan kerja, menyampaikan rekomendasi kepada alat kelengkapan dewan (AKD) terkait, serta memantau tindak lanjutnya. Pembentukan BAM menunjukkan upaya membangun mekanisme terarah untuk menghubungkan pengaduan masyarakat dengan proses kerja DPR RI. Akan tetapi, transformasi tersebut menghadapi tantangan karena penyelesaian banyak persoalan berada pada kewenangan kementerian/lembaga atau instansi lain, sementara mekanisme pemantauan hingga status penyelesaian masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, efektivitas BAM bergantung pada kejelasan penanggung jawab, jadwal tindak lanjut, koordinasi lintas AKD, keterlibatan instansi berwenang, dan pelaporan status penyelesaian. Penguatan aspek-aspek tersebut penting agar BAM tidak hanya menjadi saluran penerimaan aspirasi, tetapi juga memperkuat responsivitas dan akuntabilitas representasi DPR RI.

Kata kunci: Badan Aspirasi Masyarakat, DPR RI, partisipasi publik, representasi politik, tata kelola pengaduan

Analisa Program MBG (Makan Bergizi Gratis) sebagai Politik Populis Presiden /Wapres Prabowo Gibran Masa Pemerintahan 2024- 2025 dari Sudut Political Legitimacy

Ismiyatun, Harun, Muhammad Nuh

This article analyzes the Makan Bergizi Gratis (MBG, Free Nutritious Meals) program as an instrument of populist politics under President Prabowo Subianto and Vice President Gibran Rakabuming Raka. It focuses on the program's role in building and sustaining political legitimacy during the administration's first year. Launched in January 2025 and run by the newly established National Nutrition Agency (Badan Gizi Nasional), MBG turned a central campaign promise into the government's flagship policy. It targets tens of millions of schoolchildren, pregnant women, and toddlers, and it commands one of the largest allocations in the state budget.Drawing on Beetham's multidimensional concept of legitimacy, Easton's distinction between specific and diffuse support, and Scharpf and Schmidt's input–output–throughput framework, the article argues that MBG works mainly as a strategy of output legitimacy. Through the program, the regime seeks to convert a highly visible material benefit into public consent. This strategy is reinforced by a populist discourse that sets the "ordinary people" against inefficient elites and frames state provision as a direct personal bond between leader and citizen. Using qualitative analysis of policy documents, budget regulations, official statements, and media coverage, the study finds that MBG has delivered short-term symbolic and performative legitimacy. That legitimacy is fragile, however, because the program faces several tensions. The article concludes that legitimacy anchored primarily in distributive populism is vulnerable when policy outcomes fail. These findings add to the literature on populism, clientelism, and regime legitimation in post-Reformasi Indonesia, and more broadly in hybrid democracies of the Global South.

Keywords: political legitimacy; populism; Makan Bergizi Gratis; Prabowo–Gibran; output legitimacy; Indonesia; social policy

The Political Economy of Faith-Based Welfare: Muslim Politics and Social Development in Indonesia, Türkiye, and Malaysia

Luthfi Makhasin, Hariyadi, Wilan Humaidi

This paper examines how different configurations of Muslim politics shape the institutional development, governance, and distributive outcomes of faith-based welfare in Indonesia, Türkiye, and Malaysia. Faith-based welfare plays an important role in social development through zakat institutions, religious foundations, charitable organizations, and community-based initiatives. However, its relationship with state welfare systems varies according to political institutions, state–religion relations, and the allocation of economic resources. The central research question is, how do different configurations of Muslim politics shape faith-based welfare governance and social welfare outcomes in these three countries? Using a comparative political economy approach, the paper investigates the interactions between state institutions, Muslim political actors, religious authorities, and welfare organizations. Indonesia represents a context of decentralized governance and pluralist political competition, while Türkiye illustrates the interaction between centralized state authority, religiously oriented political leadership, and charitable networks. Malaysia provides a case of state-regulated Islamic institutions and state-level zakat administration integrated into broader redistributive policies. The analysis focuses on three dimensions, namely institutional arrangements, political mechanisms of resource allocation, and distributive welfare outcomes. Particular attention is given to accountability, beneficiary targeting, coordination between public and religious institutions, and political patronage. These factors help explain whether faith-based welfare complements state social protection, reaches vulnerable populations, and reduces socioeconomic inequalities. Methodologically, the paper employs a qualitative comparative case-study design based on policy documents, institutional regulations, academic literature, and secondary socioeconomic data. It argues that the effectiveness of faith-based welfare depends not solely on religious principles but also on institutional capacity, political accountability, and governance arrangements. By comparing these three countries, the paper contributes to debates on Muslim politics, welfare governance, and development, highlighting how political institutions shape the potential of faith-based welfare to promote inclusive and equitable social development.

Keywords: Political economy; faith-based welfare; social development; Indonesia; Türkiye; Malaysia

PANEL 12 - Platform Digital, AI, dan Demokrasi

Kedaulatan Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan: Evaluasi Implementasi SPBE dan Kesenjangan Digital Antardaerah di Indonesia

Anitha Nurak, Hendry Bakri

Transformasi digital pemerintahan di Indonesia melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 82 Tahun 2023, selama ini lebih banyak diukur dari capaian teknis dan kepatuhan administratif. Kajian ini berangkat dari argumen bahwa digitalisasi pemerintahan merupakan persoalan politik, karena menyangkut kemampuan negara mengendalikan infrastruktur, data, dan keamanan sistemnya secara merata di seluruh wilayah. Hasil evaluasi SPBE 2024 mencatat indeks SPBE nasional sebesar 3,12 dari skala 5 (predikat Baik) pada 615 instansi pusat dan daerah, melampaui target RPJMN 2020–2024 sebesar 2,60. Namun, angka rata-rata nasional tersebut menutupi ketimpangan capaian antara kawasan barat dan timur Indonesia, sementara serangan siber terhadap Pusat Data Nasional. Sementara pada 2024 menunjukkan bahwa kedaulatan digital negara masih rapuh. Kajian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan, yakni bagaimana implementasi SPBE dibaca dari perspektif kedaulatan digital, dan bagaimana kesenjangan digital antardaerah memengaruhi kapasitas negara dalam tata kelola pemerintahan. Kerangka analisis yang digunakan adalah konsep infrastructural power negara dan kedaulatan digital. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif melalui analisis data sekunder dan studi dokumen, meliputi hasil evaluasi SPBE Kementerian PANRB, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) BPS, regulasi terkait SPBE dan pelindungan data pribadi, serta dokumen kebijakan dan laporan resmi pemerintah. Data dianalisis secara tematik dan komparatif antarwilayah. Hasil kajian awal menunjukkan tiga temuan. Pertama, ketimpangan capaian SPBE mencerminkan ketimpangan kapasitas negara antarwilayah, terutama antara daerah perkotaan di Jawa dan daerah di kawasan timur Indonesia. Kedua, ketergantungan pemerintah daerah pada infrastruktur dan layanan pihak ketiga melemahkan kontrol publik atas data pemerintahan sekaligus memperbesar kerentanan keamanan siber. Ketiga, kerangka evaluasi SPBE lebih menekankan kepatuhan administratif daripada pembangunan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola keamanan informasi di daerah. Kajian ini menyimpulkan bahwa kedaulatan digital tidak cukup dimaknai sebagai isu keamanan nasional yang terpusat, tetapi juga sebagai persoalan keadilan spasial dan relasi pusat–daerah dalam negara demokratis. Implikasinya, kebijakan SPBE perlu bergeser dari orientasi kepatuhan menuju pemerataan infrastruktur, penguatan kapasitas daerah, dan tata kelola data yang inklusif. Secara teoretis, kajian ini memperluas diskusi kedaulatan digital dalam ilmu politik dengan menempatkan kapasitas daerah sebagai fondasi kedaulatan digital negara.

Kata kunci: kedaulatan digital; SPBE; kapasitas negara; kesenjangan digital; relasi pusat–daerah

Dari Objek Pasif Menuju Aktor Kolaboratif: Studi Literatur Tentang Peran Masyarakat Digital dalam Mengakselerasi Digital Governance Daerah

Dwian Hartomi Akta Padma Eldo, Irwan Abdu Nugrah

Transformasi digital pemerintah daerah masih kerap dijalankan melalui pendekatan teknokratis yang menempatkan masyarakat sebagai pengguna atau penerima layanan digital. Kondisi tersebut membatasi potensi masyarakat untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan, perbaikan layanan, pengawasan publik, dan penciptaan nilai publik. Studi ini bertujuan menganalisis pergeseran peran masyarakat digital dari objek pasif menjadi aktor kolaboratif dalam digital governance daerah, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pergeseran tersebut, serta merumuskan kerangka konseptual untuk menjelaskan dampaknya terhadap kualitas tata kelola digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dengan desain tinjauan naratif-tematik. Sumber data berupa artikel jurnal, buku ilmiah, laporan lembaga, dan dokumen akademik relevan yang diidentifikasi melalui Scopus, Google Scholar, dan SINTA, serta diperkaya melalui penelusuran daftar rujukan publikasi kunci dan artikel pengutip. Literatur dipilih berdasarkan relevansinya dengan tema digital governance, partisipasi masyarakat, ko-kreasi, digital citizenship, civic tech, dan pemerintahan daerah. Data dianalisis secara tematik melalui pengodean deduktif yang bertumpu pada perspektif public value co-creation, koproduksi digital, digital citizenship, dan civic tech, serta pengodean induktif untuk menangkap tema-tema yang berkembang dalam literatur. Hasil kajian diharapkan menunjukkan bahwa pergeseran peran masyarakat berlangsung dari penerima layanan, pemberi umpan balik, peserta konsultasi, ko-produsen layanan, hingga ko-kreator kebijakan dan inovasi publik. Transisi tersebut dipengaruhi oleh kapasitas masyarakat, terutama literasi digital, akses teknologi, modal sosial, dan kepercayaan terhadap pemerintah, serta kapasitas pemerintah yang mencakup keterbukaan data, desain platform, kepemimpinan kolaboratif, responsivitas institusional, dan fleksibilitas birokrasi. Kajian ini menawarkan Kerangka Transisi Peran Masyarakat Digital dalam Digital Governance Daerah, yang menjelaskan hubungan antara konteks daerah, faktor pendukung partisipasi, tahapan peran masyarakat digital, dan dampaknya terhadap kualitas layanan publik, transparansi, akuntabilitas, inklusi, inovasi, kepercayaan publik, dan nilai publik. Secara teoretis, kajian ini memperluas pemahaman mengenai masyarakat digital sebagai mitra pencipta nilai publik. Secara praktis, kajian ini memberikan dasar konseptual bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk merancang digital governance yang lebih partisipatif, responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: digital governance; masyarakat digital; ko-kreasi; digital; pemerintah daerah

Governing Algorithms in Southeast Asia: a Discourse Network Analysis of AI Policy Coalitions in Indonesia

Aditya Batara Gunawan, Muhammad Fauzan Rizki Ramadhan, Jessica Grace Mulyadi

How can we comprehend the policy debates surrounding the role of the state in future artificial intelligence (AI) regulation? As the Indonesian government drafts specific AI regulations targeted for 2026, little is known about the competing viewpoints shaping this framework. To close this gap, this study integrates the Advocacy Coalition Framework (ACF) theory with recent typology of state functions to analyze the AI policy subsystem in Indonesia. Using Discourse Network Analysis (DNA), the study examines a dataset comprising 159 statements from 49 actors, extracted from 193 news stories published between 2023 and 2025. The modularity analysis identifies three distinct advocacy coalitions battling to define the state's role: developmentalist coalition prioritizing innovation, protection coalition demanding strict oversight by the state, and promotion coalition advocating for decentralized self-regulation by the market. The findings reveal that the state regulator has formed a pragmatic policy synthesis, championing a "develop and control" paradigm that marginalizes the free-market approach. Furthermore, the network exposes a critical institutional fault line: while academics and civil societies demand formal legislation for legal certainty, government actors strategically favour agile, lower-level executive regulations. The study concludes that Indonesia's approach to governing AI corresponds with the recent rise and evolution of Asian digital developmental state.

Keywords: policy belief, advocacy coalition, discourse network, artificial intelligence

Kebebasan Berekspresi di Bawah Bayang-bayang UU Ite: Analisis Kritik Satir Politik di TIKTOK dalam Demokrasi Digital Indonesia

Sharim Dezhneva Denalis

Kritik politik di Indonesia semakin banyak disampaikan melalui konten satir di TikTok, sementara aktivitas di ruang digital juga berada dalam kerangka regulasi negara, termasuk UU ITE. Kajian tentang UU ITE selama ini banyak menyoroti aspek hukum dan kriminalisasi, sedangkan respons negara terhadap kritik satir di platform digital serta implikasinya bagi demokrasi relatif jarang dibahas dari perspektif Ilmu Politik. Penelitian ini bertujuan menganalisis respons negara terhadap kritik satir politik dan implikasi penerapan UU ITE terhadap kebebasan berekspresi di media sosial. Penelitian ini mengajukan dua pertanyaan. Pertama, bagaimana negara merespons kritik satir politik di TikTok melalui instrumen UU ITE? Kedua, apa implikasi dari respons tersebut bagi kebebasan berekspresi dalam demokrasi digital Indonesia? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, yaitu kritik Bima Yudho Saputro terhadap kondisi infrastruktur di Lampung, kontroversi pemblokiran akun TikTok Mulkan Let-Let, serta konten satir mengenai regulasi militer, korupsi, dan sebagainya. Data yang digunakan meliputi konten TikTok yang tersedia selama periode 2022-2026, dokumen regulasi, pernyataan pejabat, dan pemberitaan publik. Kasus dipilih secara purposif berdasarkan relevansinya dengan kritik politik serta respons negara atau perdebatan publik yang muncul. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan analisis wacana untuk mengkaji bentuk kritik, respons aktor terkait, serta bagaimana regulasi dibicarakan atau diterapkan dalam kasus yang diteliti. Teori hegemoni Antonio Gramsci digunakan untuk menganalisis hubungan antara kekuasaan, norma, dan regulasi, sedangkan teori demokrasi Alexander Meiklejohn digunakan untuk menilai pentingnya kebebasan berbicara bagi partisipasi warga dalam persoalan publik. Temuan sementara menunjukkan bahwa satir politik berpotensi memperluas diskusi publik, tetapi ruang ekspresi tersebut menghadapi sejumlah tantangan, seperti ketidakpastian penafsiran UU ITE, kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum, dan respons birokrasi yang belum tentu terbuka terhadap kritik. Selain itu, gaya komunikasi pemerintah yang cenderung formal dan birokratis berpotensi kurang selaras dengan karakteristik media sosial yang lebih santai dan informal. Penelitian ini menekankan pentingnya tata kelola ruang digital yang melindungi kebebasan berekspresi sekaligus mendukung partisipasi demokratis. Penelitian ini berargumen bahwa kedaulatan digital tidak cukup dimaknai sebagai kendali negara atas ruang digital, tetapi juga perlu mencakup perlindungan hak warga untuk menyampaikan kritik.

Kata kunci: satir politik, TikTok, kebebasan berekspresi, UU ITE, demokrasi digital, kritik

Fragmented Authority, Contested Boundaries: How Diverse Islamic Responses to the Iran–Israel War Shape Sectarian Discourse in Indonesia

Ari Ganjar Herdiansah, Noor Sulastry Yurni Ahmad

Anti-Shia stigma is a long-standing feature of Indonesia's Sunni-majority Islamic public sphere, where sectarian boundaries are often assumed to be fixed, enduring, and theologically self-evident. This article explores how the Iran–Israel war of 2025–2026 disrupted those boundaries and generated five different modes of sectarian boundary-making among Indonesian Islamic authorities. Using critical discourse analysis of YouTube sermons, online religious commentary, selected audience responses, and official statements, the study compares Shia, Salafi, algorithmic-Islamist, hybrid pesantren-digital, and quasi-state religious actors. It finds that these authority formations articulated the crisis in markedly different ways. Shia actors sought to blur sectarian lines through expressions of solidarity with Iran, while Salafi authorities worked to reinforce them through theological warnings and anti-Shia narratives. By contrast, algorithmic, hybrid, and quasi-state Sunni authorities compartmentalized, hierarchized, or backgrounded sectarian antagonism in order to foreground political solidarity with Iran and Palestine. Selected patterns of reception further suggest that narratives grounded in moral legitimacy may travel beyond core sectarian audiences more effectively than rigid discourses of doctrinal purity. The article contends that sectarian identity is not merely a matter of theological inheritance, but a contingent and contested product of struggles over authority, meaning, and moral legitimacy in networked Islamic publics.

Keywords: religious authorities, security, Sunni-Shia, Indonesia, Iran-Israel War



Disusun oleh Panitia
Temu Nasional APSIPOL
Tahun 2026

Gedung ASEEC Tower
Kampus B Universitas Airlangga
Kota Surabaya, Jawa Timur